



P R A K A R S A
Welfare Initiative for Better Societies



Thriving in Challenging Times



SCAN HERE

2022
LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT

THRIVING IN CHALLENGING TIMES

Tentang Laporan 2022 About the 2022 Report

Selamat datang di laporan tahunan 2022 The PRAKARSA.
Welcome to PRAKARSA's 2022 annual report

Tahun 2022 adalah tahun pemulihan pasca pandemi Covid-19 sehingga fokus organisasi adalah bangkit untuk mencapai target organisasi untuk menyongsong transformasi organisasi 2021-2025. PRAKARSA akan terus bekerja menjadi lembaga riset berstandar internasional. Dalam lintasan sejarah global, peran *think-tank* sangat dibutuhkan oleh para pihak. Di masa krisis, *think-tank* juga telah terbukti mampu melakukan penyesuaian peran-perannya dan mampu menyajikan analisis yang "*rigorous and applicable*" meskipun bekerja di masa yang sulit.

Tahun 2022, untuk pertama kalinya Indonesia memegang Presidensi G20. Forum G20 sendiri merupakan forum antarnegara yang terbentuk ketika krisis ekonomi melanda dunia tahun 1999 untuk menemukan solusi bersama atas kondisi ekonomi global. Dalam forum G20, Pemerintah Indonesia juga mendukung berbagai engagement group, salah satunya Civil 20. Momentum ini menjadi pengalaman baru bagi PRAKARSA untuk semakin membuktikan kepemimpinannya.

Laporan ini sebagai upaya dalam meningkatkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap PRAKARSA. Laporan ini disusun menggunakan pendekatan outcome harvesting dari seluruh kerja yang dilakukan oleh PRAKARSA sepanjang tahun 2022. Struktur laporan ini terbagi menjadi beberapa bagian yakni testimoni atas kerja-kerja PRAKARSA, capaian kerja, sumber daya manusia, dan capaian keuangan.

The year 2022 was the year of recovery after the COVID-19 pandemic. Due to this circumstance, the organization focuses on reviving and achieving organizational targets to welcome the 2021-2025 organizational transformation. PRAKARSA will continue to work to become an international standard research institution. In the trajectory of global history, think tanks play a crucial role for all parties. During times of crisis, think tanks have proven capable of adapting their roles and presenting "*rigorous and applicable*" analysis despite the predicament.

In 2022, Indonesia held the G20 Presidency for the first time. G20 is a multilateral forum established when the global financial crisis occurred in 1999, aiming to find solutions collectively. In G20, the Indonesian Government also supported various engagement groups, including Civil 20. This momentum is a new experience for PRAKARSA to prove its leadership.

This report represents an effort to increase accountability and public trust in PRAKARSA. This report was prepared using an outcome-harvesting approach from all work carried out by PRAKARSA throughout 2022. The structure of this report is divided into several sections, i.e., testimonials on PRAKARSA's work, work achievements, human resources, and financial achievements.

Disclaimer:

Laporan tahunan ini memuat profil, capaian kerja, sumber daya manusia, dan capaian keuangan selama tahun 2022. Pernyataan atas capaian dalam laporan tahunan ini disusun berdasarkan berbagai fakta berbasis bukti atas kondisi yang telah terlaksana selama 2022.

This annual report contains profiles, work achievements, human resources, and financial achievements in 2022. The statements of achievements in this annual report are prepared based on various evidence-based facts on the conditions that have been experienced in 2022.

ABOUT PRAKARSA

TENTANG PRAKARSA

The PRAKARSA adalah lembaga penelitian (think-tank) independen, berbasis di Jakarta, yang berdiri secara legal sejak tahun 2004 dan disahkan dalam SK Menteri Hukum dan HAM RI No.C-21.HT.01.03.TH.2005 dan diperbarui dalam SK Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU-000376.AH.01.08.TAHUN 2016.

The PRAKARSA is a research and policy advocacy institution, a "think and do tank", based in Jakarta, Indonesia, established on August 31, 2004 and ratified by Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. C-21.HT.01.03. TH. 2005.



PRAKARSA memilih untuk terlibat aktif dalam advokasi kebijakan dan penguatan perumusan kebijakan publik berbasis bukti dengan pendekatan multi-pihak bersama aktor-aktor pemerintah dan non-pemerintah. Area kerja PRAKARSA di tingkat lokal, nasional, dan global.

PRAKARSA is supported by researchers, practitioners, intellectuals, and policymakers with a good reputation for producing innovative, solid, and evidence-based knowledge and policy analysis.

Welfare Initiatives for Better Societies

PRAKARSA (PRAKARSA Masyarakat untuk Negara Kesejahteraan dan Pembangunan Alternatif) memiliki mandat untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang demokratis, adil, dan makmur melalui produksi pengetahuan dan mendiseminasikan ide-ide inovatif di bidang kesejahteraan dan pembangunan alternatif demi terwujudnya keadilan sosial-ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. PRAKARSA fokus pada isu kebijakan sosial, kebijakan fiskal, dan pembangunan berkelanjutan.

PRAKARSA (Community Initiative for Welfare State and Alternative Development) has the mandates to contribute to the development of a democratic, just, and prosperous society through knowledge production and disseminate innovative ideas in the field of welfare and alternative development for the realization of socio-economic justice and community welfare. PRAKARSA focuses on social policy, fiscal policy, and sustainable development issues.



PRAKARSA didukung oleh peneliti, praktisi, intelektual, dan pembuat kebijakan yang memiliki reputasi dalam produksi pengetahuan dan analisis kebijakan yang inovatif, solid, dan berbasis bukti.

PRAKARSA is supported by researchers, practitioners, intellectuals, and policymakers with a good reputation for producing innovative, solid, and evidence-based knowledge and policy analysis.

PRAKARSA bergerak pada ranah “knowledge generating”, “engagement”, dan “problem solving” agar pengetahuan berkembang menjadi sebuah tindakan kebijakan.

PRAKARSA focuses on “knowledge-generating”, “engagement”, and “problem-solving” to develop knowledge into policy action.



PRAKARSA didukung oleh donor dan mitra pembangunan yang menghargai independensi analisis dan kerja-kerja kami.

PRAKARSA is supported by donors and development partners who appreciate the independence of our analysis and work.



Visi, Misi dan Rencana Strategis 2021–2025

Vision, Mission and PRAKARSA's 2021 – 2025 Strategic Plan

Visi Vision

Menjadi lembaga riset dan pengembangan kapasitas yang mampu memelopori munculnya ide-ide inovatif dan transformatif untuk mewujudkan keadilan sosial-ekonomi dan kesejahteraan.

To become a research and capacity-building institution capable of pioneering the emergence of innovative and transformative ideas to realize socio-economic justice and welfare.

Misi Mission

1. Memproduksi dan mempromosikan wacana, pengetahuan, dan praktik kebijakan kesejahteraan. (Producing and promoting welfare policy discourses, knowledge, and practices (welfare regime))
2. Melakukan riset dan kajian di bidang kebijakan sosial, kebijakan fiskal, dan kebijakan pembangunan berkelanjutan. (Conducting research and studies in the fields of social policy, fiscal policy, and sustainable development)
3. Menyelenggarakan pengembangan kapasitas, pendidikan, dan pelatihan bagi pemangku kepentingan. (Organizing capacity building, education, and training for stakeholders)
4. Mengembangkan jejaring antar think-tank, CSOs, dan swasta dalam menginisiasi reformasi kebijakan. (Developing a network among think tanks, CSOs, policymakers, and business actors in initiating policy reforms)

Rencana Strategis 2021–2025

PRAKARSA's 2021 – 2025 Strategic Plan

- **Membangun kemandirian pendanaan organisasi secara berkelanjutan melalui pengembangan unit usaha, pengembangan dana abadi, iuran anggota dan donasi publik;** Building sustainable organizational financial independence through developing business units, developing endowment funds, membership contributions, and public donations;
- **Penguatan sumberdaya manusia (SDM) kualifikasi doktor-master di berbagai tema;** Reinforcing human resources with doctoral and master's degrees qualification in various themes;
- **Penguatan pendekatan dampak, orientasi pemecahan masalah, peningkatan kualitas dan ragam produk dan penguatan tata kelola organisasi yang akuntabel-transparan berstandar internasional;** Strengthening the impact approach, problem-solving orientation, improving product quality and variety, and enhancing international standard transparent-accountable organizational governance;
- **Penguatan modal sosial dan perluasan keanggotaan dari berbagai kelompok kunci masyarakat seperti pengusaha, akademisi, tokoh masyarakat dan pengambil kebijakan;** Reinforcing social capital and expanding membership of various community's key groups, such as entrepreneurs, academics, public figures, and policymakers;
- **Meningkatkan kolaborasi dengan universitas, think tank dan media massa di dalam negeri dan luar negeri untuk memperkuat visibilitas organisasi;** Improving collaboration with universities, think tanks, and mass media nationally and internationally to enhance the organization's visibility;
- **Menjaring kemitraan-kemitraan baru yang lebih luas baik dengan pemerintah dan industri;** Building new and broader partnerships with Government and industry;
- **Memperkuat pengaruh dan branding organisasi dengan optimalisasi media massa dan media sosial untuk meneguhkan: siapa kita, apa yang kita kerjakan, kenapa yang dikerjakan itu penting dan bagaimana pelibatan warga dalam pemecahan masalah.** Reinforcing organizational impact and branding by optimizing the use of mass media and social media to clarify: who we are, what we do, why it is important, and how the community involved in solving the problem.

Daftar Isi

Table of Contents

2	Tentang Laporan 2022 About the 2022 Report	6	Daftar Isi Table of Contents
3	Tentang PRAKARSA About PRAKARSA	7	Pengantar Direktur Eksekutif PRAKARSA Forewords from PRAKARSA'S Executive Director
5	Visi, Misi dan Rencana Strategis 2021-2025 Vision, Mission and PRAKARSA's 2021 - 2025 Strategic Plan	10	Testimoni Stakeholders tentang PRAKARSA Stakeholder Testimonials about the PRAKARSA
14	Jangkauan Media PRAKARSA The PRAKARSA Media Outreach		
15	Mewujudkan Keadilan Sosial-Ekonomi dan Kesejahteraan Realizing Socio-Economic Justice and Welfare		
16	Apresiasi, Rekognisi, dan Aktualisasi Ide Keadilan Sosial-Ekonomi & Kesejahteraan yang Inovatif-Transformatif Appreciation, Recognition, and Actualization of Innovative-Transformative Ideas of Socio- Economic Justice & Welfare		
28	Kapasitas Organisasi Bekerja di Tingkat Nasional, Regional, & Internasional Meningkat Increasing the Organization's Capacity to Work at the National, Regional, and International Levels		
33	Kapasitas Organisasi Bekerja di Tingkat Nasional, Regional, & Internasional Meningkat (PRAKARSA & G20-C20) The Increase in the Organization's Capacity to Work at the National, Regional, and International Levels (PRAKARSA & G20-C20)		
40	Produksi Pengetahuan Laporan Penelitian 2022 Knowledge Production 2022 Research Report		
43	Pengaruh Produksi Pengetahuan Effects of Knowledge Production Effects of Knowledge Production		
50	Penguatan Jejaringan Multi-Pihak: Engagement dengan Sektor Swasta Meningkat Strengthening of Multistakeholder Network: Increased Engagement with the Private Sector		
54	Pelatihan dan Penguatan Kapasitas Training and Capacity Building		
61	Promosi Ide, Wacana, Pengetahuan, dan Praktik Kebijakan Keadilan Sosial-Ekonomi & Kesejahteraan Promotion of Ideas, Discourses, Knowledge, and Practice of Socio-Economic Justice & Welfare Policies		
69	Sumber Daya Manusia dan Keuangan Organisasi Human and Financial Resources of the Organization		

Pengantar Direktur Eksekutif PRAKARSA

Forewords from PRAKARSA'S Executive Director

Tahun 2022 merupakan tahun yang cukup bersejarah bagi Indonesia dan juga bagi kami di PRAKARSA. Indonesia menjadi tuan rumah G20, dan PRAKARSA menjadi "tuan rumah" Civil-20 (C20) Indonesia. Walaupun ditengah pandemi Covid-19 yang masih membayangi berbagai kegiatan kami ditahun 2022 lalu, dengan melakukan berbagai adaptasi dan dengan semangat untuk tetap maju, kami menunjukkan bahwa kondisi yang sulit bukan halangan untuk berhasil. Kerjasama seluruh anggota tim PRAKARSA merupakan modal yang tak ternilai. Begitu pula dukungan dari berbagai pihak dan pemangku kepentingan serta mitra-mitra yang membantu kami mencapai target-target kami dalam proses produksi pengetahuan dan advokasi kebijakan.

PRAKARSA menggunakan pendekatan gabungan antara penelitian, peningkatan kapasitas serta pelibatan para pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, sesama CSOs maupun sektor swasta agar dapat berkontribusi secara efektif dalam perwujudan keadilan sosial-ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Contoh kolaborasi penelitian antara lain: riset kolaboratif di tingkat regional, dimana PRAKARSA memimpin riset Global Value Chain pada komoditas perikanan, sawit, beras, dan kopi di ASEAN, bersama Tax and Fiscal Justice Asia (TAFJA), VESS (Center for Economic and Strategic Studies) Vietnam, TWN Philippines dan Sal Forest Thailand melakukan riset wealth tax. Kami juga melakukan pelatihan analisis kebijakan dan penulisan policy brief kepada analis kebijakan di pemerintah daerah bersama Kementerian Dalam Negeri di region Barat dan Tengah Indonesia.

Kami terus berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil (OMS) agar peran dan kontribusi OMS dalam penguatan reformasi kebijakan terwujud dengan partisipasi yang bermakna. Kami aktif dalam upaya-upaya melakukan review dan masukan bagi aturan perundang-undangan dan regulasi-regulasi teknis yang sudah ada maupun yang perlu disusun oleh pembuat kebijakan. Di tingkat nasional, kami

The year 2022 was historical for Indonesia and also for us IN PRAKARSA. Indonesia hosted the G20, and PRAKARSA hosted the Indonesian Civil-20 (C20). Even amidst the Covid-19 pandemic, which still overshadowed our activities in 2022, we have shown that difficult conditions are not obstacles to success, by making adaptations while keeping our spirit high to move forward. PRAKARSA's staff teamwork and cooperation are invaluable capital. Likewise, support from multiple parties, stakeholders, and partners have helped us achieving our knowledge production and policy advocacy targets.

PRAKARSA uses a combined approach between research, capacity building and engagement with multistakeholders, including the national government, local governments, CSOs and the private sectors, so that together we can contribute effectively to realising socio-economic justice and people's welfare in Indonesia. For example, we led a collaborative research at the regional level, on the topic of Global Value Chain research on fisheries, palm oil, rice and coffee commodities in ASEAN, with Tax and Fiscal Justice Asia (TAFJA), Center for Economic and Strategic Studies (VESS) Vietnam, TWN Philippines and Sal Forest Thailand, as well as conducting wealth tax research in ASEAN. We also conducted training on policy analysis and policy briefs writing for local governments' policy analysts together with the Ministry of Home Affairs in Indonesia's West and Central regions.

We continue to collaborate with civil society organizations (CSOs) so that CSOs can have improved roles and contribution in strengthening policy reforms through meaningful participation. We are active in efforts to review and provide input on existing laws and technical regulations and those that need to be drafted by policymakers. At the national level, we are active with the Indonesian ResponsiBank Coalition in monitoring and providing input in formulating policies and implementing sustainable finance in Indonesia, as well as with various civil society coalitions concerned with the

aktif bersama Koalisi ResponsiBank Indonesia dalam memantau dan memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan sustainable finance di Indonesia, dan juga berbagai koalisi masyarakat sipil yang peduli terhadap isu-isu ketenagakerjaan, kesehatan, disabilitas, lansia serta pajak dan fiskal.

Engagement dengan private sector juga berhasil kami perkuat, diantaranya adalah (i) Bank ING yang membiayai PLTU Cirebon unit 1 dan 2 membuka ruang dialog secara langsung dengan Koalisi ResponsiBank Indonesia dan masyarakat terdampak pembangunan PLTU dan komitmen meningkatkan grievance mechanism and human rights due diligence; dan (ii) Kerja sama dengan PT Surveyor Indonesia dalam pengarus-utamaan sustainable-business dan sustainable finance telah dimulai dan akan diperkuat pada 2023.

Kapasitas PRAKARSA bekerja di tingkat nasional, regional dan internasional meningkat. Ini dapat dilihat dari kepemimpinan PRAKARSA dalam C20 yakni: (i) menjadi "tuan rumah" C20, (ii) Sustainable Finance Working Group of G20 Indonesia 2022 menerima rekomendasi C20 cq PRAKARSA terkait Sustainable Finance; (iii) Employment Working Group (EWG) G20 Indonesia 2022 menerima rekomendasi dari C20 cq PRAKARSA terkait penguatan perlindungan sosial bagi kelompok pekerja informal, penguatan kualitas pelatihan keterampilan bagi angkatan kerja dan mekanisme monitoring kesepakatan pasar kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas; (iv) Joint Finance Health Task Force of G20 Indonesia 2022 menerima rekomendasi C20 cq PRAKARSA terkait perlunya peran CSOs dalam governing body di Pandemic Fund; (v) PRAKARSA menjadi salah satu "focal point" bagi komunitas CSOs global untuk C20 advocacy dalam G20. Selanjutnya, (i) PRAKARSA menjadi "lead-organization" untuk project Fair for All (Oxfam Novib) tingkat regional Asia, khususnya di Asia Tenggara dan memimpin riset wealth tax di tingkat regional Asia; dan (ii) PRAKARSA masih menjadi Coordinating Committee of Global Tax Justice Alliance dan Co-coordinator Tax and Fiscal Justice Asia.

Secara internal, keberhasilan pada 2022 antara lain (i) berhasil menjalankan peningkatan kapasitas staff, baik melalui kursus tematik maupun degree program (doctoral dan magister), (ii) berhasil mengembangkan

issues of employment, health, disability, elderly, and tax and fiscal issues.

We have also strengthened engagement with the private sector, including with the ING Bank, which financed the Cirebon PLTU units 1 and 2, opened up space for direct dialogue with the ResponsiBank Indonesia Coalition and the communities affected by the construction of the PLTU and a commitment to improving the grievance mechanism and human rights due diligence; and (ii) Cooperation with PT Surveyor Indonesia in mainstreaming sustainable-business and sustainable finance has started and will be strengthened in 2023.

At the national, regional and international levels, PRAKARSA also became increasingly active. PRAKARSA took active role in leading C20 processes, for instance: (i) we became the "host" of C20; (ii) The Sustainable Finance Working Group of G20 Indonesia 2022 received C20 recommendations cq PRAKARSA related to Sustainable Finance; (iii) G20 Indonesia Employment Working Group (EWG) 2022 received recommendations from C20 cq PRAKARSA regarding strengthening social protection for groups of informal workers, strengthening the quality of skills training for the workforce and monitoring mechanisms for labour market agreements that include persons with disabilities; (iv) Joint Finance Health Task Force of G20 Indonesia 2022 received recommendation C20 cq PRAKARSA regarding the need for the role of CSOs in governing bodies in the Pandemic Fund; and, (v) PRAKARSA is one of the "focal points" for the global CSOs community for C20 advocacy in the G20. Furthermore, PRAKARSA leads Fair for All (Oxfam Novib) project at the Asian regional level, especially in Southeast Asia, leads wealth tax research at the Asian regional level; and is Coordinating Committee of Global Tax Justice Alliance and Co-coordinator of Tax and Fiscal Justice Asia.

Internally, in 2022, we were able to (i) build and improve staff capacity, both through thematic courses and upgrade of qualifications through degree programs (doctoral and masters), and (ii) development of media publications through websites and social media.

The year 2022 is a year of recognition for PRAKARSA, reflecting in the awards and appreciation we received from key stakeholders, for instance: (i) The Government of Indonesia, through the Ministry of

media publikasi melalui website dan sosial media.

2022 merupakan tahun recognition kepada PRAKARSA. Ini dapat dilihat dari penghargaan dari para pihak yakni: (i) Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas memberikan penghargaan kepada PRAKARSA sebagai Pemenang Terbaik II Kategori Lembaga Penelitian atas kontribusinya dalam pencapaian Sustainable Development Goals (Indonesia's SDGs Action Awards 2022); (ii) Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, Kemenko PMK, Kemenko Ekonomi, Kemensos, OJK, BRIN, BPJS, DJSN, Bappenas, Ombudsman RI, Kemendagri, KSP, TNP2K, dan Bappeda DKI Jakarta selalu melibatkan dan meminta masukan dari PRAKARSA dalam berbagai proses perumusan kebijakan.

Secara khusus, saya sebagai Direktur Eksekutif menyampaikan terima kasih kepada Badan Pengurus, manajemen, staf, associate, penasehat, mitra kerja, donor (Ford Foundation, Oxfam Novib, Oxfam Regional Asia, Human Act, AHF, Wikimedia, Filantropi Indonesia, Rainforest Action Network, Rainforest Foundation Norway, Action Aid), Kementerian/Lembaga, DPR, OMS, jurnalis dan publik secara luas atas dukungan terhadap kerja-kerja PRAKARSA.

Laporan Tahunan 2022 adalah cara kami menjalankan transparansi dan akuntabilitas publik. Di sini kami menyajikan berbagai ringkasan atas kegiatan dan capaian serta ringkasan keuangan PRAKARSA sepanjang tahun 2022. Kami berharap laporan ini dapat meningkatkan kepercayaan stakeholders kepada PRAKARSA.

PRAKARSA berkomitmen untuk terus bekerja dan berkontribusi bagi pembangunan menuju masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Kami berharap para pihak dapat terus mendukung kami. Sekali lagi, terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami selama ini.

Rawa Bambu Jakarta Selatan, Maret 2023

Ah Maftuchan

Direktur Eksekutif The PRAKARSA

National Development Planning/Bappenas, awarded PRAKARSA as the Best Winner II in the Research Institute Category for its contribution to achieving the Sustainable Development Goals (Indonesia's SDGs Action Awards 2022); (ii) Ministry of Manpower, Ministry of Finance, Coordinating Ministry for PMK, Coordinating Ministry for Economic Affairs, Ministry of Social Affairs, OJK, BRIN, BPJS, DJSN, Bappenas, Ombudsman RI, Ministry of Home Affairs, KSP, TNP2K, and Bappeda DKI Jakarta always involve and consult with PRAKARSA in various policy formulation processes.

In particular, I, as the Executive Director, would like to thank the Governing Body, management, staff, associates, advisers, partners, and donors (Ford Foundation, Oxfam Novib, Oxfam Regional Asia, Human Act, AHF, Wikimedia, Filantropi Indonesia, Rainforest Action Network, Rainforest Foundation Norway, Action Aid), Ministries/Agencies, Parliament, CSOs, journalists and the public at large for their support for PRAKARSA's work.

The 2022 Annual Report is our way of implementing transparency and public accountability. In this report we present summaries of activities and achievements and financial summaries of PRAKARSA throughout 2022. We hope that this report can increase stakeholders' trust in PRAKARSA.

PRAKARSA is committed to working and contributing to developing a more just and prosperous society. We hope that the parties continue to support us. Once again, thank you to all those who have supported us so far.

Rawa Bambu, South Jakarta, Maret 2023

Ah Maftuchan

The PRAKARSA Executive Director

Testimoni Stakeholders tentang PRAKARSA

Stakeholder Testimonials about the PRAKARSA

Edi Prio Pambudi

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional/
Co-Sherpa G20 Indonesia

Deputy Minister for the Coordination of International Economic
Cooperation/Co-Sherpa of G20 Indonesia



Saya mengucapkan terima kasih atas sumbangsih dan leadership the PRAKARSA terutama sahabat saya Ah Maftuchan sebagai Sherpa-C20 dan tim yang telah berkontribusi pada Engagement Group C20 Presidensi G20 Indonesia tahun 2022.

C20 hadir sebagai karavan pembawa aspirasi dari akar rumput kepada pemerintah guna menjadikan Leaders' Declaration Presidensi G20 Indonesia yang inklusif, tepat sasaran, dan diverse agar presidensi kita yang bertemakan "recover together, recover stronger" lebih bermakna dan menyentuh semua kalangan. Hal ini penting, karena di saat semua mata tertuju pada kepemimpinan Indonesia, inklusivitas adalah kunci. Terlebih, kelompok rentan dan informal adalah salah satu paling terdampak akibat pandemi. Maka kita hadir untuk mereka.

I would like to express my gratitude for the contribution and leadership of the PRAKARSA, especially for Ah Maftuchan, as the Sherpa of C20, and the team that has contributed to the C20 Engagement Group of Indonesia's G20 Presidency in 2022.

C20 was like a wagon carrying aspirations from the grassroots to the Government to make the Leaders' Declaration of Indonesia's G20 Presidency inclusive, right on target, and diverse. Thus, our presidency with the theme "recover together, recover stronger" could be more meaningful and embrace all groups. It is crucial since inclusivity is the key aspect while everyone focuses on Indonesia's leadership. Moreover, vulnerable and informal groups are the ones most affected by the pandemic. For that reason, we are here for them.

Yustinus Prastowo

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis

Special Staff to the Minister of Finance for Strategic Communications



Tahun 2022 bukan tahun sembarangan, tahun penuh tantangan sekaligus pembelajaran. Usaha keras telah dilakukan, pemulihan ekonomi terus diupayakan, ancaman resesi dapat dihindarkan, bantuan sosial dan subsidi juga dipertebal. Capaian ini tak diwujudkan sendirian, tapi dengan berbagai dukungan dan kerja sama semua pihak, termasuk lembaga-lembaga pemikir selayaknya The PRAKARSA yang telah sudi menelurkan buah pemikiran berharga untuk diwujudkan.

Kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada The PRAKARSA yang turut menjadi mitra pemikir dan mengawal pemerintah dalam setiap proses reformasi kebijakan fiskal. Kami berharap The PRAKARSA terus berkembang, semakin produktif dengan berbagai output yang aktual, serta tetap sudi membantu pemerintah untuk mencapai cita-cita Indonesia berkeadilan sosial dan sejahtera.

Perubahan di masa depan adalah keniscayaan, jadikan masa lalu sebagai pembelajaran, hari ini torehan, dan hari esok sebagai pengharapan. Sambut tahun 2023 dengan tetap optimis dan penuh kewaspadaan.

The year 2022 is a year full of challenges and learning. That year saw a lot of hard work, the pursuit of economic recovery, the averting of the recession threat, and the improvement of social assistance and subsidies. These accomplishments were realized with the various support and cooperation of all parties, including think tanks, such as The PRAKARSA, who have been willing to provide valuable thoughts.

We appreciate and are grateful to The PRAKARSA for being a think tank partner and overseeing the Government in every process of fiscal policy reform. We hope that The PRAKARSA will continue to grow, become more productive with various actual outputs, and be willing to assist the Government in realizing a socially just and prosperous Indonesia.

Changes in the future are inevitable, the past is a lesson, today is a milestone, and tomorrow is a hope. We must welcome 2023 with optimism and vigilance.



Dante Rigmalia, M.Pd

Ketua Komisi Nasional Disabilitas RI

Chairperson of the National Disabilities Commission

Kami mengenal The PRAKARSA lewat kajian isu disabilitas yang dilakukan. Kajian-kajian tersebut memberikan manfaat yang sangat baik bagi Komisi Nasional Disabilitas (KND) dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lembaga pemantau upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia. Kajian The PRAKARSA memberikan banyak laporan berbasis riset dengan argumen ilmiah yang komprehensif, terbaru, dan kohesif dengan penyajian data dan ide yang jelas.

Laporan kajian yang dibuat oleh The PRAKARSA sangat menarik dan diperlukan untuk mendukung pengarusutamaan isu disabilitas serta dapat dijadikan bahan untuk kampanye untuk mendorong semua pihak agar mengarusutamakan isu disabilitas khususnya dalam akses pekerjaan baik kepada pemerintah maupun nonpemerintah.

We know The PRAKARSA through its study of disability issues. These studies provide excellent benefits for the National Disabilities Commission (KND) in carrying out its tasks and functions as a monitoring agency for efforts to respect, protect, and fulfill the rights of persons with disabilities in Indonesia. The PRAKARSA studies provide many research-based reports with comprehensive, up-to-date, and cohesive scientific arguments with a clear presentation of data and ideas.

The study reports by The PRAKARSA are intriguing and useful to support the mainstreaming of disability issues. They can become materials for campaigns to encourage all parties, both Government and non-government, to mainstream disability issues, especially in terms of access to jobs.

Dr. Joko Tri Haryanto

Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral,
Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Center for Climate Change Financing and Multilateral Policy,
Fiscal Policy Office, Ministry of Finance



Sebagai hybrid think-tank, PRAKARSA memiliki privilege untuk memengaruhi suatu kebijakan pemerintah. Dengan kapasitas yang dimiliki berupa rekomendasi kebijakan berbasis bukti, akan menjadi nilai tambah bagi PRAKARSA saat melakukan engagement dengan pemerintah. PRAKARSA memiliki posisi strategis dengan menawarkan rekomendasi kebijakan inovatif berdasarkan hasil riset yang dilakukan. Di isu keuangan berkelanjutan, PRAKARSA memiliki kemampuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan terkait pembiayaan SDGs maupun pembiayaan terkait perubahan iklim. PRAKARSA perlu terus memperkuat kapasitas dalam melakukan riset-riset inovatif untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada khususnya dalam memberikan masukan dan mendukung pemerintah untuk menangani isu perubahan iklim maupun pembangunan berkelanjutan.



As a hybrid think-tank, PRAKARSA has the privilege of influencing government policy. By offering evidence-based policy recommendations, PRAKARSA adds value when engaging with the Government. PRAKARSA has a strategic position by offering innovative policy recommendations based on research results. Regarding sustainable finance issues, PRAKARSA has the capability to provide policy recommendations related to SDGs financing and climate change financing. PRAKARSA needs to continue strengthening its capacity in conducting innovative research to respond to existing challenges, especially in providing input and supporting the Government to deal with issues of climate change and sustainable development.

Jangkauan Media PRAKARSA

The PRAKARSA Media Outreach

Produksi pengetahuan yang semakin meningkat mendorong PRAKARSA untuk melakukan upgrade kanal publikasi secara berkala seperti pembaruan dan pengembangan website dan optimisasi penggunaan media sosial. Sebagai hasilnya, pirsawan dan pembaca website PRAKARSA mengalami peningkatan sebanyak 335% dan jumlah followers media sosial PRAKARSA meningkat lebih dari 35% di 2022. Penambahan followers atau engagement sosial media PRAKARSA berkontribusi langsung pada upaya mempromosikan wacana, pengetahuan, dan praktik kebijakan kesejahteraan. Secara langsung, upaya ini didukung oleh komitmen PRAKARSA dalam meningkatkan dukungan komunikasi.

Increased knowledge production encourages PRAKARSA to regularly upgrade its publication channels, such as updating and developing websites and optimizing the use of social media. Accordingly, PRAKARSA's website audiences and readers increased by 335%, and its social media followers increased by more than 35% in 2022. The increase in social media followers or engagement directly contributed to the promotion of welfare policy discourses, knowledge, and practices. The efforts were driven by PRAKARSA's commitment to improving communication support.

 8 Laporan Riset Study reports	 6 Policy Brief	17 Diskusi & diskusi publik Seminars & public discussion	8 Opini Media
Rp 14.076.384.263 Anggaran yang dikelola Managed budget		12 Siaran pers Pers releases	4 Capacity building
		3 Rekrut staff baru Recruit news staff	4 Staff magang Intern staff
		2 Restruktur staff Restructure staff	4 Staff resigned
		19 Total Staff	
		10 staff	
		9 staff	

Instagram
2.997 (+1.052) followers
233.049 reach
466 total post

Facebook
6.110 (+597) followers
385.982 reach
189 total post
431 like

Website
123.456 views
20.153 downloads

Twitter
1.220 (+40) followers
47.845 impressions
426 total post

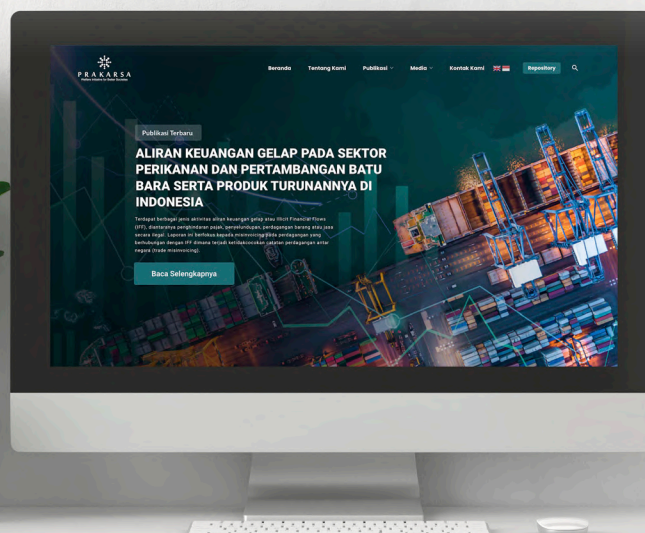
Youtube
501 (+36) subscriber
2.417 views
16 total post

Kutipan Berita
138 media online
5 media cetak

Scan Barcode Here



visit website





Mewujudkan Keadilan Sosial-Ekonomi dan Kesejahteraan

Realizing Socio-Economic Justice and Welfare



Apresiasi, Rekognisi, dan Aktualisasi Ide Keadilan Sosial-Ekonomi & Kesejahteraan yang Inovatif-Transformatif

Appreciation, Recognition, and Actualization of Innovative-Transformative Ideas of Socio-Economic Justice & Welfare

K/L dan Pemda: Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, Kemenko PMK, Kemenko Ekonomi, Kemenkos, OJK, BRIN, BPJS, DJSN, Bappenas, Ombudsman RI, Kemendagri, KSP, TNP2K, dan Bappeda DKI Jakarta selalu melibatkan dan meminta masukan dari PRAKARSA dalam berbagai proses perumusan kebijakan.

PRAKARSA was constantly involved and asked to provide suggestions in various policy formulation processes by Ministries/Agencies and Local Governments, i.e., Ministry of Manpower, Ministry of Finance, Coordinating Minister for Human Development and Cultural, Coordinating Minister for the Economic Affairs, Ministry of Social Affairs, FSA, National Research and Innovation Agency (BRIN), the Social Security Administrative Body (PBJS), the National Social Security Board, The National Development Planning Agency (Bappenas), Indonesian Ombudsman of the Republic of Indonesia, Ministry of Home Affairs, the Executive Office of the President, The National Team for the Acceleration of Poverty Reduction (TNP2K), and the Regional Development Planning Agency of Special Capital Region of Jakarta.

Berbagai kunjungan atau kegiatan diskusi yang melibatkan PRAKARSA tidak terlepas dengan agenda pengembangan dan penguatan sistem manajemen pengetahuan organisasi. Sepanjang tahun 2022, PRAKARSA telah berupaya untuk meningkatkan standar tata kelola, transparansi, dan akuntabilitasnya melalui berbagai cara seperti digitalisasi manajemen proyek organisasi, manajemen pengetahuan dan proses, serta pipeline manajemen keuangan.

PRAKARSA juga memperkuat proses diseminasi produk-produk yang dihasilkan melalui berbagai

Various visits or discussion activities involving PRAKARSA were inseparable from the agenda of developing and strengthening organizational knowledge management systems. PRAKARSA worked throughout 2022 to improve its governance, transparency, and accountability standards by various means, such as digitalization of organizational project management, knowledge and process management, and pipelines for financial management.

PRAKARSA also reinforced the process of product dissemination through multiple channels, such as

kanal seperti website, media sosial, dan media massa. Selanjutnya, terkait dengan peningkatan kapasitas staf, PRAKARSA telah menyelenggarakan beberapa sesi sharing knowledge dan pelatihan internal untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian staf internal terkait dengan isu-isu sesuai penelitian dan advokasi yang dilakukan oleh PRAKARSA.

Capaian ini berkontribusi pada visi PRAKARSA yakni memelopori munculnya ide-ide inovatif dan transformatif. PRAKARSA juga berperan dan diakui oleh Bappenas sebagai salah satu organisasi yang mendorong isu pembuatan dana abadi OMS di Indonesia. Hal ini terbukti dengan dilibatkannya PRAKARSA dalam pembahasan substansi Perpres Dana Abadi OMS oleh Bappenas pada Agustus 2022 lalu.

websites, social media, and mass media. Regarding staff capacity building, PRAKARSA organized several knowledge-sharing sessions and internal training to increase the knowledge and expertise of internal staff related to issues discussed in the research and advocacy conducted by PRAKARSA.

This achievement contributed to realizing PRAKARSA's vision to pioneer the development of innovative and transformative ideas. Besides, PRAKARSA played specific roles and was recognized by Bappenas as one of the organizations that promoted creating an endowment fund for CSO in Indonesia. It was evidenced by PRAKARSA's involvement in the discussion on the substance of the Presidential Regulation on CSO Endowment Fund by Bappenas in August 2022.



Pemerintah Indonesia melalui Bappenas RI memberikan penghargaan kepada PRAKARSA sebagai Pemenang Terbaik II Kategori Lembaga Penelitian atas kontribusinya dalam pencapaian Sustainable Development Goals (Indonesia's SDGs Action Awards 2022).

The Indonesian Government, through Bappenas of the Republic of Indonesia (Bappenas RI), granted an award to PRAKARSA as the Best Winner II in the Research Institute Category for its contribution to achieving the Sustainable Development Goals (Indonesia's SDGs Action Awards 2022).

Pada 1 Desember 2022, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas RI) menganugerahkan penghargaan SDGs Action Award kepada PRAKARSA dalam kategori lembaga penelitian terbaik kedua atas kontribusinya terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). Penghargaan ini merupakan pengakuan pemerintah terhadap kerja-kerja PRAKARSA dalam bidang pembangunan berkelanjutan, kebijakan sosial, dan kebijakan fiskal di Indonesia.

Penghargaan dari Bappenas merupakan bukti apresiasi atas kerja-kerja PRAKARSA sebagai lembaga kajian dan pengembangan kapasitas yang mampu memelopori ide-ide untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Selama tahun 2022, PRAKARSA secara konsisten melakukan kajian,

On December 1, 2022, the Ministry of National Development Planning of the Republic of Indonesia (Bappenas) awarded PRAKARSA the SDGs Action Award in the category of the second-best research institution for its contribution to achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). The award symbolized the Government's acknowledgment of PRAKARSA's work in the scope of sustainable development, social policy, and fiscal policy in Indonesia.

The award from Bappenas is a form of appreciation for PRAKARSA's work as an institution for studies and capacity building that is capable of pioneering ideas to create social welfare and justice. During 2022, PRAKARSA consistently conducted studies, disseminated them to both Government and non-government networks, and capitalized on the study

menyebarkannya pada jaringan baik pemerintah ataupun non-pemerintah, mengcapitalisasi hasil kajian untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, serta untuk memperbaiki kebijakan.

Penghargaan ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari kontribusi jaringan eksternal termasuk Bappenas yang telah merekognisi kerja-kerja PRAKARSA terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Penghargaan yang diterima menjadi penyemangat PRAKARSA untuk semakin baik dalam bekerja demi memajukan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.

results to increase public knowledge and awareness, as well as to improve policies.

The award was definitely associated with the contribution of the external network, including Bappenas, which recognized PRAKARSA's work towards achieving the Sustainable Development Goals. The award became an encouragement for PRAKARSA to be better at promoting equitable and sustainable development in Indonesia.

Bappenas RI meminta masukan dari PRAKARSA terkait penyusunan Roadmap Health for All dalam RPJMN 2025-2029.

Bappenas RI requested suggestions from PRAKARSA regarding the preparation of the Roadmap Health for All in the 2025-2029 National Medium-Term Development Plan (RPJMN).



Bappenas RI melalui CISDI mengundang PRAKARSA dalam pertemuan konsultasi dengan OMS pada konsultasi publik tanggal 19 September 2022 yang diadakan di Jakarta dalam penyusunan kebijakan Health for All dalam RPJMN 2025-2029. Konsultasi dengan OMS ini berupaya untuk mendapatkan masukan dari OMS yang fokus terhadap isu kesehatan. Rekomendasi dan masukan dari PRAKARSA diberikan berdasarkan beberapa penelitian, yakni defisit JKN mengapa dan bagaimana mengatasinya, universal health coverage, tracking Indonesia's progress. Dalam beberapa kesempatan, CISDI juga berkolaborasi dengan PRAKARSA dalam isu kesehatan sehingga dilakukan rekognisi mengenai expertise PRAKARSA. Usulan yang diajukan oleh PRAKARSA juga diakomodasi dalam roadmap kolaborasi pemerintah dan non-pemerintah terkait health for all.

Capaian ini sejalan dengan misi PRAKARSA mengenai pengembangan jejaring antar-CSO dalam menginisiasi reformasi kebijakan. Kontribusi

Bappenas RI, through CISDI, invited PRAKARSA to a meeting with CSOs at a public consultation on September 19, 2022, held in Jakarta to prepare the Health for All policy in the 2025-2029 RPJMN. The consultation with CSOs sought input from them that focused on health issues. PRAKARSA offered recommendations and suggestions based on several studies, i.e., "the National Health Insurance (JKN) Deficit: Why and How to Overcome It", "Universal Health Coverage", and "Tracking Indonesia's Progress." On several occasions, CISDI also collaborated with PRAKARSA on health issues and therefore its expertise on the relevant subject was recognized. The recommendations proposed by PRAKARSA were also accommodated in the roadmap for Government and non-government collaborations related to Health for All.

That attainment was aligned with PRAKARSA's mission regarding developing inter-CSO networks in initiating policy reforms. PRAKARSA's contribution to

PRAKARSA dalam memberikan rekomendasi terkait penyusunan roadmap turut dipengaruhi oleh kuatnya hasil kajian PRAKARSA terkait isu kesehatan sehingga memiliki bukti-bukti yang kuat dalam membangun usulan perbaikan kebijakan.

CISDI sebagai salah satu OMS yang diberikan mandat oleh Bappenas RI untuk memimpin perencanaan dalam kebijakan Health for All merupakan salah satu mitra yang telah memberikan rekognisi pada PRAKARSA dalam isu kesehatan. Momentum C20 dan peran PRAKARSA dalam working group akses vaksin dan kesehatan global C20 merupakan faktor yang mendukung PRAKARSA dalam melakukan advokasi kebijakan di isu kesehatan.

providing recommendations related to the roadmap preparation was also influenced by the significant results of PRAKARSA studies related to health issues. The underlying results became vital evidence in developing policy improvement proposals.

CISDI, one of the CSOs mandated by Bappenas RI to lead planning in the Health for All policy, was one of the partners that recognized PRAKARSA's capacity in health issues. C20 momentum and PRAKARSA's role in the C20 vaccine access and global health working group constituted factors that supported PRAKARSA in conducting policy advocacy on health issues.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI meminta PRAKARSA memberi masukan tentang fasilitas kesejahteraan pekerja dan memasukkan rekomendasi PRAKARSA ke dalam draf PP tentang fasilitas kesejahteraan pekerja bagi karyawan penyandang disabilitas dan perempuan di tempat kerja.

The Indonesian Ministry of Manpower requested PRAKARSA to provide input on worker welfare facilities and include PRAKARSA's recommendations in the draft of the Government Regulation regarding worker welfare facilities for employees with disabilities and women in the workplace.

Kemenaker di sepanjang 2022 menyusun dokumen Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas Kesejahteraan Pekerja sebagai turunan dari UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Dalam prosesnya, Kemenaker menyelenggarakan konsultasi dengan CSO dan Serikat Pekerja untuk memberikan masukan terhadap PP tersebut. PRAKARSA sebagai salah satu think tank yang berfokus pada isu ketenagakerjaan turut memberikan masukan mengenai pentingnya kewajiban pemberi kerja untuk menyediakan fasilitas penunjang kerja yang akomodatif dan ramah bagi penyandang disabilitas dan pekerja perempuan

Upaya yang dilakukan ini selaras dengan visi dan misi PRAKARSA untuk mewujudkan keadilan ekonomi sosial dan kesejahteraan serta mempromosikan praktik kebijakan kesejahteraan di Indonesia. Kontribusi ini merupakan tindak lanjut dari hasil temuan studi yang dilakukan PRAKARSA mengenai kebutuhan yang akomodatif, layak, dan inklusif bagi penyandang disabilitas dan perempuan untuk

Throughout 2022, the Ministry of Manpower prepared a Government Regulation regarding Worker Welfare Facilities as a derivative of Law No. 13 of 2013 concerning Manpower. In the process, the Ministry of Manpower held consultations with CSOs and Workers' Unions to provide suggestions on Government Regulation. PRAKARSA, as a think tank focusing on employment issues, also provided input regarding the significance of employers' obligations to provide support facilities that are accommodative and friendly for persons with disabilities and women workers.

Those efforts aligned with PRAKARSA's vision and missions to achieve socio-economic justice and prosperity as well as to promote welfare policy practices in Indonesia. This contribution was a follow-up to the study findings presented by PRAKARSA regarding the accommodative, appropriate, and inclusive needs of persons with disabilities and women to support work productivity.

The success of urging PRAKARSA to include their

menunjang produktivitas kerja.

Keberhasilan mendesakkan rekomendasi ke dalam PP tentunya turut dipengaruhi oleh dukungan dari Kemenaker yang selama ini telah memiliki relasi dan kerja sama dengan PRAKARSA. Hasil kerja sama yang baik tersebut membuat Biro Kerjasama Kemenaker merekognisi dan mengenalkan PRAKARSA sebagai CSO mitra Kementerian Ketenagakerjaan RI pada isu pasar kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas dan perempuan. Faktor lain yang mendorong keberhasilan ini adalah karena adanya agenda strategis Kemenaker untuk menyusun dokumen Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.

recommendations in Government Regulation was undoubtedly attributable to the support from the Ministry of Manpower, which so far had collaborated and cooperated with PRAKARSA. The results of this promising collaboration made the Cooperation Bureau of the Ministry of Manpower recognize and introduce PRAKARSA as the partner CSO of the Indonesian Ministry of Manpower on the issue of an inclusive job market for persons with disabilities and women. Another factor behind this success was the Ministry of Manpower's strategic agenda to compile a Government Regulation on Workers' Welfare Facilities.

Direktur Eksekutif PRAKARSA terpilih sebagai salah satu anggota Komite Nasional Indonesia untuk Program Management of Social Transformations UNESCO-BRIN Periode Tahun 2022.

The Executive Director of PRAKARSA was appointed as a member of the Indonesian National Committee for UNESCO-BRIN's Management of Social Transformations Program for the 2022 period.

Komite Nasional Indonesia adalah komite pertama di Asia Tenggara dan sepenuhnya scientis. Pada 1 Oktober 2021, Kepala BRIN melalui SK No. 58/HK/2021 terkait penunjukan focal point UNESCO. Kemudian pada pertengahan tahun 2022, Direktur Eksekutif PRAKARSA ditunjuk sebagai salah satu dari 14 orang komite pelaksana dalam Komite Nasional Indonesia untuk program MOST UNESCO.

Capaian ini berkontribusi pada misi PRAKARSA untuk mengembangkan jejaring antar-think-tank, CSOs, dan swasta dalam menginisiasi reformasi kebijakan. Komite ini melakukan pengawalan dan penegakan mandat pemenuhan hak (bagian dari HAM) yang masih perlu diperjuangkan dalam kerangka inklusi sosial.

Keberhasilan ini turut dipengaruhi oleh dukungan dari BRIN yang selama ini telah memiliki relasi dan kerja sama dengan PRAKARSA. Faktor lain yang mendorong keberhasilan ini adalah karena PRAKARSA telah memiliki hasil penelitian terkait dengan penyandang disabilitas di tempat kerja.

The Indonesian National Committee is the first fully scientific Committee in Southeast Asia. On October 1, 2021, the Head of BRIN issued Decree Letter No. 58/HK/2021 regarding the appointment of a UNESCO focal point. Afterward, in mid-2022, the Executive Director of PRAKARSA was appointed as one of the 14 implementing committees in the Indonesian National Committee for UNESCO's MOST program.

This achievement contributed to PRAKARSA's mission to develop networks among think tanks, CSOs, and the private sector in initiating policy reforms.

This success was also due to BRIN's support, collaboration, and cooperation with PRAKARSA. Another driving factor of this success was that PRAKARSA already had research results related to persons with disabilities in the workplace.



Ombudsman RI merekognisi PRAKARSA sebagai lembaga riset yang dapat dijadikan rujukan untuk isu kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan.

The Ombudsman of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as Ombudsman RI) recognized PRAKARSA as an eligible research institution to be referred to on issues related to social security policies for healthcare and employment.



Ombudsman Republik Indonesia merupakan Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang memiliki tugas untuk melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraannya. Salah satu prioritas pada Keasistenan Utama VI Ombudsman RI yang membidangi substansi jaminan sosial di tahun 2022 adalah memberikan saran kepada pimpinan penyelenggara negara guna perbaikan pelayanan publik terkait pelayanan publik dalam perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Untuk mendapatkan perspektif OMS, Tim Ombudsman RI melakukan dua kali pertemuan dengan PRAKARSA.

Pada pertemuan pertama, PRAKARSA diundang pada tanggal 3 Maret 2022 untuk berkunjung ke kantor Ombudsman RI untuk menemui Anggota Komisioner Ombudsman yang mengundang Tim PRAKARSA sebagai narasumber untuk menyampaikan pandangan tentang kontroversi BPJS sebagai persyaratan untuk mengurus administrasi kependudukan (SIM, jual beli, sertifikat tanah, dan sebagainya).

Pada pertemuan kedua pada 29 Oktober 2022, Tim Ombudsman mengunjungi kantor PRAKARSA untuk mendapatkan paparan yang berisikan informasi atas hasil sejumlah studi PRAKARSA mengenai isu terkait jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan.

The Ombudsman of the Republic of Indonesia is a state institution authorized to oversee the implementation of public services and make efforts to prevent maladministration. One of the priorities of the Principal Assistants (Keasistenan Utama) VI of Ombudsman RI in charge of social security matters in 2022 includes providing advice to the heads of state administrators to improve public services related to social security for the community organized by BPJS Ketenagakerjaan (BPJS/Social Security Administrative Body's program for employment) and BPJS Kesehatan (BPJS/Social Security Administrative Body's program for healthcare). To perceive the perspective of CSOs, the Ombudsman RI held two meetings with PRAKARSA.

At the first meeting on March 3, 2022, PRAKARSA was invited to visit the Ombudsman RI office to meet the Members of the Board of Commissioners of Ombudsman RI. They invited PRAKARSA as speakers to present their opinions on the controversy over the public administration processes (driving license application, buying and selling lands, land certificates, and so on) that require active BPJS membership status.

At the second meeting on October 29, 2022, the Ombudsman RI visited the PRAKARSA's office to obtain information regarding the results of several studies by PRAKARSA on issues related to social security policies for employment and healthcare



Pertemuan tersebut sejalan dengan misi PRAKARSA dalam mengembangkan jejaring antar-think-tank, CSOs, dan swasta dengan pemerintah dalam menginisiasi reformasi kebijakan. Pertemuan tersebut merupakan hasil peran PRAKARSA yang secara konsisten melakukan studi terkait program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan termasuk tracking Universal Health Care (UHC), defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), JKK, dan JKM.

Inisiatif Ombudsman RI untuk berkunjung dan berdiskusi dengan PRAKARSA merupakan wujud apresiasi dan rekognisi pihak eksternal terhadap kerja dan kontribusi PRAKARSA selama ini. Faktor yang mendorong terwujudnya pertemuan tersebut adalah adanya komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus-menerus memperbaiki kebijakan perlindungan sosial di Indonesia.

The meetings aligned with PRAKARSA's mission to develop networks among think tanks, CSOs, the private sector, and the Government in initiating policy reforms. The meetings were possible since PRAKARSA consistently conducted studies related to the BPJS Kesehatan and BPJS Ketenagakerjaan, including tracking the Universal Health Care (UHC) program and the deficits of the National Health Insurance (Jaminan Kesehatan Nasional/JKN), Work-Related Accident Benefit (Jaminan Kecelakaan Kerja/JKK), and Death Benefit (Jaminan Kematian/JKM) programs.

The initiative of Ombudsman RI to visit and hold a discussion with PRAKARSA indicates the appreciation and recognition from the external parties for the work and contribution of PRAKARSA so far. One of the driving factors of the meeting was the Indonesian Government's commitment to improving social protection policies in Indonesia.



OJK menerima masukan dan memberikan penghargaan terhadap kontribusi PRAKARSA dan ResponsiBank Indonesia dalam penyusunan Taksonomi Hijau Indonesia dan Ditjen GAKKUM KLHK meminta PRAKARSA bersedia menjadi mitra strategis untuk mainstreaming isu perlindungan lingkungan dan keuangan berkelanjutan di Indonesia.

The Financial Services Authority (OJK) received input and gave appreciation for the contribution of PRAKARSA and ResponsiBank Indonesia in the preparation of the Indonesian Green Taxonomy. Additionally, the Directorate General of Environmental and Forestry Law Enforcement asked PRAKARSA to be a strategic partner for mainstreaming environmental protection and sustainable finance issues in Indonesia.



Pada pertemuan audiensi antarlembaga dan dialog kebijakan tanggal 22–25 November 2022 di Jakarta, OJK, GAKKUM KLHK, BI, dan BKF merekognisi PRAKARSA dan Koalisi ResponsiBank Indonesia sebagai pihak strategis untuk mainstreaming isu keuangan berkelanjutan di Indonesia.

Isu deforestasi termasuk hilangnya keanekaragaman hayati akibat proses bisnis yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan risiko sistemik dan membahayakan stabilitas keuangan suatu negara. Oleh karena itu, ekosistem kebijakan berkelanjutan yang melibatkan beberapa kementerian dan lembaga penting untuk dikembangkan termasuk di dalamnya Otoritas Jasa Keuangan, Direktorat Penegakan Hukum KLHK, Bank Indonesia, dan Badan Kebijakan Fiskal. Atas kebutuhan ini, kementerian dan lembaga tersebut menyambut baik inisiatif ResponsiBank Indonesia dan Rain Forest Network untuk menyelenggarakan diskusi pemangku kebijakan dalam pengarusutamaan isu keuangan berkelanjutan dan mendorong seluruh stakeholder untuk mengimplementasikan keuangan berkelanjutan.

At the interagency formal visit and policy dialogue on November 22–25, 2022, in Jakarta, the Financial Services Authority (OJK), the Directorate General of Environmental and Forestry Law Enforcement, Bank Indonesia (BI), and the Fiscal Policy Agency (BKF) recognized PRAKARSA and the ResponsiBank Indonesia Coalition as strategic parties for mainstreaming sustainable finance issues in Indonesia.

The issue of deforestation, including the loss of biodiversity due to irresponsible business processes, can pose systemic risks and endanger a country's financial stability. Therefore, it is necessary to develop a sustainable policy ecosystem that involves several ministries and institutions, including the Financial Services Authority (OJK), the Directorate General of Environmental and Forestry Law Enforcement of the Ministry of Environment and Forestry, Bank Indonesia (BI), and the Fiscal Policy Agency (BKF). For this reason, the ministries and institutions welcomed the initiative of ResponsiBank Indonesia and Rain Forest Network to hold stakeholder



Pertemuan diskusi kebijakan multipihak ini berkontribusi pada pencapaian visi dan misi PRAKARSA untuk mengembangkan jejaring antar-think-tank, CSOs, swasta, dan pemerintah dalam menginisiasi reformasi kebijakan khususnya untuk reformasi kebijakan keuangan berkelanjutan di Indonesia. PRAKARSA dengan jaringannya yang kuat turut berkontribusi dalam terselenggaranya pertemuan tersebut.

Dukungan luar sehingga capaian ini terwujud adalah karena adanya pihak-pihak yang memberikan kepercayaan kepada PRAKARSA karena dapat melakukan advokasi kebijakan dengan baik, seperti koalisi Forest and Finance, Bersihkan Indonesia, dan lain-lain. Faktor eksternal yang mendorong pertemuan ini adalah adanya hasil kesepakatan pemimpin G20 yang berkomitmen pada capaian rendah karbon.

discussions on mainstreaming sustainable finance issues and encourage all stakeholders to implement sustainable finance.

This multistakeholder policy discussion contributed to the achievement of PRAKARSA's vision and mission to develop networks among think tanks, CSOs, the private sector, and the Government in initiating policy reforms, especially for sustainable finance policy reforms in Indonesia. PRAKARSA, with its strong network, also contributed to the implementation of the meeting.

External support for this achievement included parties who trust PRAKARSA in conducting policy advocacy excellently, such as the Forest and Finance coalition, the Bersihkan Indonesia movement, and others. One of the external factors that prompted this meeting was the results of an agreement between the G20 leaders to commit themselves to low-carbon outcomes.

Bappeda DKI Jakarta menempatkan PRAKARSA sebagai tim ahli dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD) 2023-2026 dan memasukkan isu hak kesehatan dan ketenagakerjaan.

The Regional Development Planning Agency of the Special Capital Region of Jakarta (hereinafter referred to as Bappeda DKI Jakarta) appointed PRAKARSA as an expert team in preparing the 2023-2026 Regional Action Plan for Persons with Disabilities (hereinafter referred to as RAD-PD) and included issues of rights to healthcare and employment.



RAD PD merupakan salah satu mandat Bappenas RI untuk dilaksanakan di tingkat provinsi dan DKI Jakarta menjadi salah satunya. Untuk melaksanakan ini, Bappeda DKI Jakarta melibatkan PRAKARSA dan 24 organisasi penyandang disabilitas sebagai tim ahli dalam penyusunan RAD PD 2023-2026 yang berlangsung sejak 7 Februari hingga 10 November 2022 melalui beberapa kali pertemuan. Hasilnya, Bappeda Pemprov DKI Jakarta memasukkan isu kesehatan, ketenagakerjaan, ekonomi digital, dan pendataan bagi seluruh penyandang disabilitas di dalam RAD PD.

Capaian ini berkontribusi secara langsung pada misi PRAKARSA terkait perbaikan praktik kebijakan kesejahteraan di Indonesia. Rekomendasi yang disampaikan merujuk pada hasil penelitian PRAKARSA dengan judul “Disabilitas dalam Dunia Kerja”. Poin-poin rekomendasi yang diterima berdasarkan hasil penelitian ini antara lain:

1. perlunya perbaikan kebijakan yang dapat mengakomodasi kebutuhan ragam disabilitas,
2. peningkatan anggaran pada program yang menasar penyandang disabilitas di berbagai OPD, dan
3. penyediaan akomodasi layak untuk penunjang mobilitas harian.

Peran PRAKARSA secara langsung dipengaruhi oleh Bapak Endiq Yogana, Kepala Subbidang Sosial Pemuda dan Olahraga, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bappeda Provinsi DKI Jakarta, yang didorong oleh momentum amanah yang diterima Bappeda DKI Jakarta dari Bappenas RI untuk melaksanakan perencanaan RAD PD tahun 2023-2026.

RAD-PD is one of the mandates of the National Development Planning Agency (Bappenas) to be implemented at the provincial level, including the Special Capital Region of Jakarta. Therefore, Bappeda of DKI Jakarta involved PRAKARSA and 24 organizations of persons with disabilities as an expert team in preparing the 2023-2026 RAD-PD, which took place from February 7 to November 10, 2022, through several meetings. As a result, Bappeda of DKI Jakarta included healthcare, employment, digital economy, and data collection for all persons with disabilities in the RAD-PD.

This achievement directly contributed to PRAKARSA's mission of improving welfare policy practices in Indonesia. The recommendations offered referred to the results of PRAKARSA's study entitled “Disabilitas dalam Dunia Kerja” (Disabilities in the Workplace). The points of the recommendations received based on the results of this study include:

1. The need for policy improvements that can accommodate the needs of persons with various disabilities;
2. The need for budget increases for programs that target persons with disabilities in various Regional Apparatus Organizations; and
3. The provision of adequate accommodation to support daily mobility.

The role of PRAKARSA was directly influenced by Endiq Yogana, the Head of the Social, Youth, and Sports Subdivision, People's Welfare Division, Bappeda of DKI Jakarta, who was encouraged by the mandate of Bappenas for Bappeda of DKI Jakarta to plan out the 2023-2026 RAD-PD.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Bappeda Provinsi DKI Jakarta mengintegrasikan rekomendasi PRAKARSA mengenai Indikator Kemiskinan Multidimensi ke dalam dokumen perencanaan pilot project penanggulangan kemiskinan ekstrem di DKI Jakarta.

The Regional Poverty Alleviation Coordinating Team (TKPKD) of Bappeda of DKI Jakarta integrated recommendations for PRAKARSA regarding Multidimensional Poverty Indicators into the planning document for a pilot project for alleviating extreme poverty in DKI Jakarta.



Bappeda DKI Jakarta tanggal 29 Maret 2022 mengundang PRAKARSA untuk menjadi penanggap dalam rapat pleno tim teknis pengembangan pengelolaan (pemutakhiran dan pemanfaatan) data terpadu penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam sesi tersebut, PRAKARSA menyampaikan pentingnya mengintegrasikan kemiskinan multidimensi ke dalam perencanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem di DKI Jakarta. Rekomendasi ini didasari pada hasil riset PRAKARSA yang berjudul “Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) di Indonesia Tahun 2015-2018”.

Masukan yang diberikan PRAKARSA terhadap pilot project penanggulangan kemiskinan sejalan dengan visi PRAKARSA sebagai lembaga yang memberikan ide inovatif dalam mewujudkan keadilan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan. Sejak 2012, PRAKARSA menjadi lembaga think-tank pertama yang konsisten dalam mengukur indeks kemiskinan multidimensi sehingga mendorong rekognisi dari Bappeda DKI Jakarta.

Nasrudin Djoko Surjono selaku Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kesmiskinan Provinsi DKI Jakarta senantiasa berkordinasi dengan PRAKARSA untuk mendapatkan masukan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi DKI Jakarta. Selain Bappeda, DKI Jakarta, BPS RI dan Bappenas RI juga pihak eksternal yang mengakui peran PRAKARSA sebagai organisasi yang melakukan pengukuran kemiskinan secara multidimensi.

On March 29, 2022, Bappeda of DKI Jakarta invited PRAKARSA as a responder at the plenary meeting of the technical team for developing the management (updating and utilization) of integrated data for the implementation of social welfare. In this session, PRAKARSA conveyed the importance of integrating multidimensional poverty into extreme poverty alleviation planning in DKI Jakarta. This recommendation was based on the results of PRAKARSA's study entitled “Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) di Indonesia Tahun 2015-2018” (Multidimensional Poverty Index (IKM) in Indonesia in 2015-2018).

The input PRAKARSA has provided for the poverty alleviation pilot project was in line with PRAKARSA's vision to be an institution that provides innovative ideas in realizing social, economic, and welfare justice. Since 2012, PRAKARSA has become the first think tank to consistently measure the multidimensional poverty index, thereby encouraging the recognition of Bappeda DKI Jakarta.

Nasrudin Djoko Surjono, the Secretary of the Coordinating Team for Poverty Management of DKI Jakarta, has always coordinated with PRAKARSA to obtain input regarding the implementation of social welfare in DKI Jakarta. In addition to Bappeda DKI Jakarta, other external parties recognizing the role of PRAKARSA as an organization that measures poverty in a multidimensional way include Statistics Indonesia (BPS RI) and Bappenas.

Kampus dan Non-pemerintah: UI, UPN, UGM, Unibraw, Unair, UMN, dan lain-lain serta berbagai CSOs selalu mengundang PRAKARSA untuk sharing, menjadi narsum, dan memberikan kuliah tamu. "Peer-group" memberikan pengakuan terhadap kapasitas PRAKARSA dalam isu kebijakan sosial, kebijakan fiskal-ekonomi, dan sustainable development.

Universities and non-governmental organizations: UI, UPN, UGM, Brawijaya University, Airlangga University, UMN, and others, as well as various CSOs constantly invited PRAKARSA to share information and become a speaker and a guest lecturer. "Peer group" acknowledges PRAKARSA's capacity in social policy, fiscal-economic policy, and sustainable development issues.



Sepanjang tahun 2022, berbagai kunjungan dan kegiatan diskusi dilakukan oleh kampus dan lembaga non-pemerintah bersama PRAKARSA. PRAKARSA dijadikan rujukan untuk bertukar ide, gagasan, dan informasi berdasarkan riset yang telah dihasilkan. Hasil produk pengetahuan dijadikan rujukan oleh mahasiswa dan juga organisasi masyarakat sipil dalam penelitiannya. Capaian ini berkontribusi pada visi PRAKARSA yakni memelopori munculnya ide-ide inovatif dan transformatif. Hal ini juga dipengaruhi oleh upaya PRAKARSA dalam memperkuat proses diseminasi melalui berbagai kanal seperti website, media sosial, dan media massa.

Throughout 2022, universities and non-governmental organizations together with PRAKARSA conducted various visits and discussion activities. PRAKARSA was invited to share ideas and information based on the research they conducted. The research results became a reference for students and several civil society organizations. This achievement contributed to realizing PRAKARSA's vision to pioneer the emergence of innovative and transformative ideas. In addition, it was influenced by PRAKARSA's efforts to reinforce the dissemination process through varied channels such as a website, social media, and mass media.



Kapasitas Organisasi Bekerja di Tingkat Nasional, Regional, & Internasional Meningkat

Increasing the Organization's Capacity to Work at the National, Regional, and International Levels

Riset kolaboratif di tingkat regional: PRAKARSA memimpin riset Global Value Chain pada komoditas perikanan, sawit, beras, dan kopi di ASEAN. Bersama Tax and Fiscal Justice Asia (TAFJA), VESS (Center for Economic and Strategic Studies) Vietnam, TWN Philippines dan Sal Forest Thailand.

Collaborative research at the regional level: PRAKARSA led the Global Value Chain research on fisheries, palm oil, rice, and coffee commodities in ASEAN with Tax and Fiscal Justice Asia (TAFJA), VESS (Center for Economic and Strategic Studies) Vietnam, TWN Philippines, and Sal Thai Forest.

Pada periode Desember 2021 sampai Mei 2022, anggota Tax and Fiscal Justice Asia (TAFJA) di ASEAN yaitu Indonesia, Thailand, Vietnam, dan The Philippines untuk pertama kalinya melakukan kolaborasi riset dengan tema Global Value Chain pada komoditas perikanan, sawit, beras, dan kopi sebagai bahan advokasi berbasis bukti di tingkat ASEAN.

TAFJA merupakan jaringan regional dari Global Alliance for Tax Justice (GATJ), sebuah koalisi organisasi masyarakat sipil yang bergerak dan berfokus pada keadilan pajak dan fiskal. PRAKARSA pada tahun 2019 terpilih sebagai Co-Coordinator TAFJA dan mendapatkan dana hibah dari Oxfam Platform Regional Asia untuk melaksanakan program Fair for All (F4A). Dalam program F4A, PRAKARSA menginisiasi untuk melakukan riset kolektif di antara 4 negara anggota TAFJA di ASEAN yang dilakukan untuk mengumpulkan bukti yang menjadi dasar untuk

From December 2021 to May 2022, members of Tax and Fiscal Justice Asia (TAFJA) in ASEAN, including Indonesia, Thailand, Vietnam, and The Philippines, conducted collaborative research for the first time regarding the Global Value Chain on fisheries, palm oil, rice, and coffee commodities as evidence-based advocacy materials at the ASEAN level.

TAFJA is a regional network of the Global Alliance for Tax Justice (GATJ), a coalition of civil society organizations that engage and focus on tax and fiscal justice. In 2019, PRAKARSA was elected as TAFJA's Co-coordinator and received a grant from Oxfam in Asia to implement the Fair for All (F4A) program. In the F4A program, PRAKARSA took the initiative to conduct collaborative research in the four countries of TAFJA members in ASEAN to collect evidence that became the basis for strengthening inclusive and sustainable supply chain advocacy in ASEAN.

memperkuat advokasi rantai pasok yang inklusif dan berkelanjutan di regional ASEAN.

Kolaborasi riset ini sejalan dengan visi PRAKARSA yaitu menjadi lembaga kajian dan pengembangan kapasitas berstandar internasional dan misi PRAKARSA terkait jejaring antar-think-tank, CSOs, dan swasta dalam menginisiasi reformasi kebijakan. Dalam riset kolaboratif ini, PRAKARSA berperan sebagai koordinator riset karena PRAKARSA diakui sebagai lembaga yang memiliki kredibilitas dan kualitas dalam memproduksi bukti untuk advokasi.

Capaian ini didorong oleh dukungan dari F4A Asia agar CSO melakukan praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di ASEAN. Selain itu, saat PRAKARSA terpilih menjadi Co-Coordinator TAFJA pada tahun 2019, terdapat mandat untuk dilaksanakannya riset kolaboratif di antara anggota TAFJA.

This collaborative research aligned with PRAKARSA's vision to become an international standard research and capacity-building institution and PRAKARSA's mission of developing a network among think tanks, CSOs, and private sectors in initiating policy reforms. PRAKARSA played a pivotal role as the coordinator in this research since PRAKARSA was recognized as an institution with credibility and quality in producing evidence for advocacy.

This achievement was driven by F4A Asia's support for CSOs to carry out sustainable and responsible business practices in ASEAN. Apart from that, when PRAKARSA was elected as TAFJA's Co-coordinator in 2019, there were several mandates to carry out collaborative research in the four countries of TAFJA members.

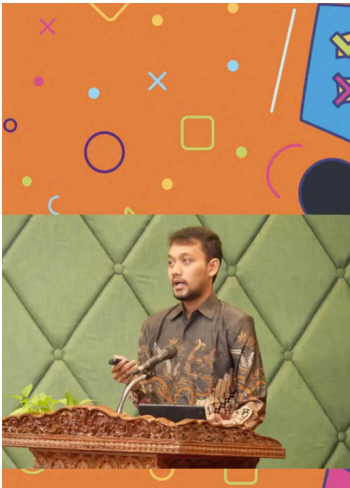
Hasil riset Global Value Chain ASEAN sebagai bahan advokasi berbasis bukti di tingkat ASEAN dan disampaikan oleh PRAKARSA pada Side-Event Fifth ASEAN Inclusive Business Summit 2022 di Siem Reap Kamboja (Oktober 2022).

The results of the ASEAN Global Value Chain research served as evidence-based advocacy material in ASEAN and were presented by PRAKARSA at the Side-Event of the 2022 Fifth ASEAN Inclusive Business Summit in Siem Reap Cambodia (October 2022).



PRAKARSA bersama Oxfam Platform Regional Asia dan Oxfam di Kamboja menggelar side event berupa diskusi dengan tema "Creating Shared Value in The ASEAN Through Inclusive and Responsible Business" pada pertemuan kelima ASEAN Inclusive Business

PRAKARSA, with Oxfam in Asia and Oxfam in Cambodia, held a side event in the form of a discussion with the theme "Creating Shared Value in the ASEAN through Inclusive and Responsible Business" at the 2022 Fifth ASEAN Inclusive Business Summit



ASEAN's agriculture and fisheries – a brief overview

Country	Value Added of the Agricultural Sector (%)		Share of Agricultural Employment (%)	
	2010	2018	2010	2018
Brunei	0.73	1.02	0.69	1.37
Cambodia	33.88	22.01	57.28	33.65
Indonesia	13.93	12.81	39.13	29.63
Laos	22.60	15.71	71.46	63.24
Malaysia	10.09	7.54	14.22	10.66
Myanmar	36.85	21.35	53.54	49.70
Philippines	13.75	9.65	32.84	24.29
Singapore	0.04	0.03	0.91	0.74
Thailand	10.52	8.13	38.24	32.14
Vietnam	18.38	14.68	48.71	38.60

- Some **ASEAN countries dominate the global market for agricultural commodities** such as palm oil (Indonesia, Malaysia), coffee (Vietnam), or rice (Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia).
- These sectors are integrated into the global economy, through the global value chain and ASEAN as a regional trade pact (AEC).
- The agricultural sector is a significant source of GDP and employment in most ASEAN countries.
- ASEAN agricultural and fisheries production and supply chain have not yet inclusive of marginal actors that participate mainly at the upstream level or Base of the Economic Pyramid (BoP).



Summit 2022 di Siem Reap pada Selasa 25 Oktober 2022. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Under Secretary of State and Spokesman Ministry of Commerce of Cambodia (H.E. Penn Sovicheat), Direktur Perundingan Perdagangan ASEAN Kementerian Perdagangan Indonesia (Dina Kurniasari), dan Rice Program Manager Rikolto Indonesia (Nana Suhartana). Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyampaikan hasil studi PRAKARSA yang berjudul "Tracking Global Value Chains (GVCs) on Palm Oil, Fisheries, Rice and Coffee Commodities in Indonesia, Thailand, The Philippines, and Vietnam" dan untuk mendiskusikan bagaimana kerangka bisnis inklusif dapat meningkatkan penghidupan pelaku marjinal dalam rantai pasok di ASEAN.

Capaian ini berkontribusi pada misi PRAKARSA untuk mengembangkan jejaring antar-think-tank, CSOs, dan swasta dalam menginisiasi reformasi kebijakan. Acara tersebut juga membantu PRAKARSA dalam mewujudkan misi untuk memproduksi dan mempromosikan wacana, pengetahuan, dan praktik kebijakan kesejahteraan (welfare regime).

Kegiatan ini tidak terlepas dari dukungan pihak eksternal termasuk Kementerian Perdagangan Indonesia dan Kamboja sebagai pemangku kebijakan yang bersedia untuk menghadiri undangan diskusi dan merespons rekomendasi terkait praktik bisnis inklusif. Momentum ASEAN Inclusive Business merupakan peluang bagi PRAKARSA melaksanakan kegiatan side event tersebut.

in Siem Reap on Tuesday, October 25, 2022. This program was attended by the Under Secretary of State and Spokesman of the Ministry of Commerce of Cambodia, H.E. Penn Sovicheat; the Director of ASEAN Trade Negotiations at the Indonesian Ministry of Trade, Dina Kurniasari; and the Rice Program Manager of Rikolto Indonesia, Nana Suhartana. The activity aimed to convey the results of PRAKARSA's study entitled "Tracking Global Value Chains (GVCs) on Palm Oil, Fisheries, Rice and Coffee Commodities in Indonesia, Thailand, The Philippines, and Vietnam" and to discuss how an inclusive business framework could improve the livelihoods of marginal actors in ASEAN's supply chains.

As a result, this achievement contributed to PRAKARSA's mission to develop a network among think tanks, CSOs, and private sectors in initiating policy reforms. Apart from that, the event also assisted PRAKARSA in realizing its mission to produce and promote welfare policy discourses, knowledge, and practice.

This activity was possible due to the support of external parties, including the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia and the Ministry of Economy, Trade, and Industry of Cambodia, as policymakers who were willing to attend the invitation to discuss and respond to recommendations on inclusive business practices. The ASEAN Inclusive Business momentum was an opportunity for PRAKARSA to carry out this side event.





PRAKARSA menjadi lead-organization untuk Project Fair for All (Oxfam Novib) tingkat regional Asia dan memimpin riset wealth-tax di tingkat regional ASEAN.

PRAKARSA became the “lead organization” for the Fair for All Project (Oxfam Novib) at the Asian regional level and led the wealth-tax research at the ASEAN regional level.

Sejak tahun 2020, PRAKARSA secara konsisten memperluas wacana penelitian mengenai pajak kekayaan. Isu pajak kekayaan diyakini dapat menjadi salah satu upaya untuk mengurangi ketimpangan di dunia dan memobilisasi orang untuk mendorong distribusi kekayaan dunia yang lebih adil. Di tingkat regional Asia, PRAKARSA melakukan studi lanjutan mengenai pajak kekayaan tingkat ASEAN setelah sebelumnya di tahun 2022 melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Pajak Kekayaan di Indonesia: Potensi dan Peluang”.

Pencapaian ini berkontribusi pada ketiga misi PRAKARSA, yakni 1) memproduksi dan mempromosikan wacana kebijakan kesejahteraan, 2) melakukan riset dan kajian di bidang kebijakan fiskal, serta 3) mengembangkan jejaring dalam menginisiasi reformasi kebijakan. Capaian ini dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya PRAKARSA sejak 2020 bekerja sama dengan Millionaire for Humanity, organisasi yang mendapat dukungan dari para miliarder di Eropa untuk memperluas gagasan pajak kekayaan khususnya untuk mendukung penanggulangan pandemi Covid-19. Faktor lainnya yang turut memengaruhi PRAKARSA dalam upaya ini adalah adanya kampanye pajak kekayaan yang diinisiasi Millionaires for Humanity dan dukungan Project Fair for All.

Since 2020, PRAKARSA has consistently expanded the research discourse on wealth tax. The wealth tax issue is believed to be one of the efforts to reduce inequality in the world and mobilize people to promote a more equitable distribution of world wealth. At the Asian regional level, PRAKARSA conducted a follow-up study on wealth tax at the ASEAN level after, in 2022, conducting research entitled “Penerapan Pajak Kekayaan di Indonesia: Potensi dan Peluang” (Implementation of Wealth Tax in Indonesia: Potential and Opportunities).

This achievement contributed to the three missions of PRAKARSA, namely, 1) producing and promoting welfare policy discourses, knowledge, and practices (welfare regime); 2) conducting research and studies in the fields of social policy, fiscal policy, and sustainable development; and 3) developing a network among think tanks, CSOs, policymakers, and business actors in initiating policy reforms. This achievement could be gained because of several factors, one of which was the collaboration between PRAKARSA and Millionaire for Humanity that has been established since 2020. Millionaire for Humanity is an organization that receives support from billionaires across Europe to expand the idea of a wealth tax, especially to support the handling of the COVID-19 pandemic. Other supports influencing PRAKARSA’s efforts include the wealth tax campaign initiated by Millionaires for Humanity and the support of the Fair for All Project.

PRAKARSA masih menjadi Coordinating Committee of Global Tax Justice Alliance dan Co-Coordinator Tax and Fiscal Justice Asia.

PRAKARSA continued to be the Coordinating Committee of the Global Alliance for Tax Justice and Co-Coordinator of Tax and Fiscal Justice Asia.



Organisasi masyarakat sipil di kawasan Asia yang tergabung dalam Tax and Fiscal Justice Asia (TAFJA) menggelar pertemuan di Kathmandu, Nepal, pada Agustus 2022. Agenda ini merupakan pertemuan rutin tahunan para anggota TAFJA dalam rangka melakukan kilas balik pelaksanaan dan capaian agenda satu tahun yang telah dilaksanakan serta membuat perencanaan dan perumusan strategi kegiatan untuk satu tahun mendatang.

Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan organisasi dari berbagai negara mulai dari Indonesia, Filipina, Kamboja, India, Pakistan, dan Nepal. Organisasi tersebut di antaranya The PRAKARSA, Asian People's Movement for Debt and Development (APMDD), Third World Network (TWN), Indian Social Action Forum (INSAF), Bantay Kita, Worker's Information Center (WIC), Alliance for Tax and Fiscal Justice Nepal, dan Tax and Fiscal Justice Nepal.

The PRAKARSA selaku Co-Coordinator TAFJA sekaligus Koordinator TSWFG C20 berkesempatan memfasilitasi penyusunan rencana dan strategi oleh TAFJA, C20, dan CSO lainnya menjelang pelaksanaan G20 Summit. Beberapa isu terkait taxation yang didiskusikan pada forum TAFJA yaitu terkait UN Framework: The Need to Reform The Global Tax Institutions; OECD/G20 Inclusive Frameworks on BEPS Pillar 1 dan 2; Increase Revenues for Pandemic Recovery by Taxing The Wealthy; Incorporating Gender Equality Dimension in Tax Policy; Implementing an Effective Carbon Tax Rate.

Civil society organizations in the Asian region that are members of Tax and Fiscal Justice Asia (TAFJA) organized a meeting in Kathmandu, Nepal, in August 2022. This agenda was part of a regular annual meeting of TAFJA members aiming to review the implementation and achievements of the one-year agenda that has been completed, as well as to plan and formulate activity strategies for the upcoming year.

The meeting was attended by representatives of organizations from various countries, including Indonesia, the Philippines, Cambodia, India, Pakistan, and Nepal. These organizations included PRAKARSA; Asian Peoples' Movement on Debt and Development (APMDD); Third World Network (TWN); Indian Social Action Forum (INSAF); Bantay Kita; Worker's Information Center (WIC); Alliance for Tax and Fiscal Justice - Nepal; and Tax and Fiscal Justice Nepal.

PRAKARSA, as the Co-Coordinator of TAFJA and the Coordinator of C20 TSWFG, had the opportunity to facilitate the preparation of plans and strategies by TAFJA, C20, and other CSOs ahead of the G20 Summit. Several issues related to taxation were discussed at the TAFJA forum, namely related to the UN Framework: the need to reform the global tax institutions; OECD/G20 inclusive frameworks on BEPS Pillars 1 and 2; increase revenues for pandemic recovery by taxing the wealthy; incorporating gender equality dimension in tax policy; implementing an effective carbon tax rate.



Kapasitas Organisasi Bekerja di Tingkat Nasional, Regional, & Internasional Meningkat (PRAKARSA & G20-C20)

The Increase in the Organization's Capacity to Work at the National, Regional, and International Levels (PRAKARSA & G20-C20)

PRAKARSA & C20 Indonesia: menjadi "tuan rumah" C20 Presidensi 2022.

PRAKARSA & C20 Indonesia: Hosting the 2022 C20 Presidency.

Tahun 2022 ini, Indonesia memegang presidensi G20. Begitu juga Presidensi C20 juga dipegang oleh organisasi masyarakat sipil dari Indonesia. Sebelumnya, C20 2021 dilaksanakan di Italia dan C20 2020 digelar di Riyadh, Arab Saudi. Civil 20 (C20) adalah wadah organisasi masyarakat sipil dari seluruh anggota G20 untuk terlibat dengan para pemerintah anggota G20 dalam menghadapi isu-isu krusial di dunia saat ini. Melalui forum yang disediakan G20 ini, kelompok masyarakat sipil di forum C20 dapat memberikan masukan, rekomendasi, bahkan kritik yang akan dibahas di KTT G20 di akhir tahun nanti.

Pembentukan kelompok C20 Indonesia dimulai pada Oktober 2021 dengan pengumpulan anggota yang kemudian menghasilkan tujuh kelompok kerja, di antaranya Akses Vaksin dan Kesehatan Global; Keadilan Gender; Pajak dan Keuangan Berkelanjutan; Lingkungan, Keadilan Iklim dan Transisi Energi; SDG's dan Kemanusiaan; Pendidikan, Digitalisasi dan Ruang Sipil; serta Anti Korupsi.

Sebagai tuan rumah C20 Indonesia, PRAKARSA memiliki peran yang cukup strategis di mana Direktur

In 2022, Indonesia held the G20 presidency. Likewise, the C20 Presidency was also held by civil society organizations from Indonesia. Previously, the 2021 C20 was held in Italy, and the 2020 C20 took place in Riyadh, Saudi Arabia. Civil 20 (C20) is a forum for civil society organizations from all G20 members to engage with the governments of G20 members in dealing with the current crucial issues in the world. Through this forum provided by the G20, civil society groups in the C20 forum could offer inputs, recommendations, and criticisms to be discussed at the G20 Summit at the end of the year.

The C20 Indonesia group was established in October 2021 by collecting members, which later resulted in seven working groups, including (i) Vaccine Access and Global Health; (ii) Gender Equality; (iii) Taxation and Sustainable Finance; (iv) Environment, Climate Justice, and Energy Transition; (v) SDGs and Humanity; (vi) Education, Digitization, and Civil Space; and (vii) Anti-Corruption.

In the C20 Indonesia event, PRAKARSA played quite a strategic role. The Executive Director of PRAKARSA



Eksekutif PRAKARSA terpilih menjadi Sherpa C20, Manajer Program menjadi Co-Chair C20, Bendahara Badan Pengurus PRAKARSA Binny Buchori menjadi SC C20, Sugeng Bahagijo yang merupakan Anggota Badan Pengurus PRAKARSA menjadi Chair C20, Dwi Rahayu Ningrum Program Officer Sustainable Development menjadi Coordinator Taxation-Sustainable Finance WG of C20, Tim Social Policy penggerak working grup SDGs-Humanitarian dan Akses Vaksin dan Kesehatan Global, serta beberapa staf program/keuangan terlibat menjadi kesekretariatan C20.

Capaian ini mendukung pencapaian visi lembaga yakni untuk memelopori munculnya ide-ide inovatif dan transformatif. Hal ini juga sejalan dengan Renstra PRAKARSA 2021-2025 untuk meningkatkan kolaborasi dengan universitas, think tank, dan media massa di dalam negeri dan luar negeri untuk memperkuat visibilitas organisasi. Capaian ini tidak terlepas dari dukungan yang diberikan oleh seluruh organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam C20 karena telah memiliki kepercayaan kepada PRAKARSA.

was appointed to be the Sherpa of C20; the Program Manager of PRAKARSA became the Co-Chair of C20; the Treasurer of the PRAKARSA's Governing Body, Binny Buchori, became the SC of C20; a Member of the PRAKARSA's Governing Body, Sugeng Bahagijo, became the Chair of C20; Sustainable Development Officer of the PRAKARSA, Dwi Rahayu Ningrum, became the Coordinator of Taxation and Sustainable Finance Working Group of C20; the Social Policy Team became the driver of the SDGs and Humanity and Vaccine Access and Global Health working groups; and several program/financial staff were involved in the C20 secretariat.

This achievement contributed to realizing PRAKARSA's vision, namely pioneering the emergence of innovative and transformative ideas. This is also in line with the PRAKARSA's 2021-2025 Strategic Plans to improve collaboration with universities, think tanks, and mass media nationally and internationally to enhance the organization's visibility. This achievement was attributable to the support of all civil society organizations of C20 who have put their trust in PRAKARSA.

Sustainable Finance Working Group of G20 Indonesia 2022 menerima rekomendasi TSFWG C20 cq PRAKARSA terkait pelibatan CSO dalam proses pengembangan dokumen Taksonomi Hijau di negara-negara G20.

Sustainable Finance Working Group of the 2022 G20 Indonesia Presidency accepted the recommendations from the C20 TSFWG, in this case, PRAKARSA, regarding the involvement of CSOs in developing Green Taxonomy documents in G20 countries.

Kelompok kerja Taxation and Sustainable Finance C20 memberikan rekomendasi berdasarkan agenda prioritas yang ditetapkan G20. Salah satu masukan TSFWG untuk isu keuangan berkelanjutan, khususnya pada agenda prioritas terkait kerangka transition

The C20 Taxation and Sustainable Finance working group offered recommendations based on the priority agenda set by the G20. One of the TSFWG's inputs was on sustainable finance issues, particularly on the priority agenda related to the





finance dan peningkatan kredibilitas komitmen lembaga keuangan. TSFWG G20 memandang perlunya instrumen taksonomi hijau ditetapkan secara mandatory dan melibatkan seluruh stakeholder, khususnya organisasi masyarakat sipil dalam proses pengembangan dokumen taksonomi hijau di negara-negara G20. Dokumen Taksonomi Hijau ini penting untuk meningkatkan kredibilitas lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaannya yang berkontribusi pada pencapaian mitigasi dan adaptasi perubahan iklim hingga tujuan lingkungan lainnya.

Proses penyusunan dokumen rekomendasi kebijakan terkait isu keuangan berkelanjutan ini dilakukan secara partisipatif dan melibatkan kolaborasi dari organisasi masyarakat sipil di Indonesia maupun internasional. Koordinasi dan diskusi intens dilakukan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang memastikan apa yang menjadi concern dari masyarakat sipil tersampaikan. Mengingat isu keuangan berkelanjutan adalah isu cross-cutting, banyak organisasi masyarakat sipil yang concern di isu transisi energi, kehutanan, lingkungan, gender, hingga ekonomi rakyat turut bergabung memberikan masukan. Beberapa organisasi yang terlibat di antaranya adalah Fair Finance Asia, SOMO, Rainforest Action Network, Rainforest Foundation Norway, PRAKARSA, TuK Indonesia, WALHI, Oxfam in Indonesia, Aksi for Gender Ecological Justice, dan lembaga lain.

Rekomendasi kebijakan tersebut diakomodasi oleh SFWG yang menyebutkan dalam laporannya untuk pelibatan seluruh stakeholder dalam pengembangan dokumen Taksonomi Hijau, khususnya organisasi masyarakat sipil. Hal ini mengingat CSO memiliki expertise maupun jaringan luas ke masyarakat akar rumput baik yang terdampak dari adanya pembiayaan yang tidak berkelanjutan.

transition finance framework and increasing the credibility of financial institution commitments. The G20 TSFWG viewed that green taxonomy instruments should be mandatory and involve all stakeholders, particularly civil society organizations, in developing green taxonomy documents in G20 countries. This Green Taxonomy document is crucial to increase the credibility of financial institutions in distributing financing that contributes to climate change mitigation and adaptation as well as other environmental goals.

The compilation of policy recommendations concerning sustainable finance issues was carried out in a participatory manner and in collaboration with national and international civil society organizations. Intense coordination and discussions were conducted to formulate policy recommendations, ensuring that civil society's concerns were conveyed. Considering that sustainable finance is a cross-cutting issue, many civil society organizations concerned with the energy transition, forestry, environment, gender, and the people's economy provided suggestions. Some of those organizations include Fair Finance Asia; SOMO; Rainforest Action Network; Rainforest Foundation Norway; PRAKARSA; TuK Indonesia; WALHI; Oxfam in Indonesia; Aksi! for Gender, Social, and Ecological Justice; and other institutions.

The policy recommendations were accommodated by the SFWG, which mentioned in its report the involvement of all stakeholders in developing the Green Taxonomy document, especially civil society organizations. It is because CSOs have the expertise and a wide network of grassroots communities affected by unsustainable financing.

Employment Working Group (EWG) G20 Indonesia 2022 menerima rekomendasi dari C20 cq PRAKARSA terkait penguatan perlindungan sosial bagi kelompok pekerja informal, penguatan kualitas pelatihan keterampilan bagi angkatan kerja, dan mekanisme monitoring kesepakatan pasar kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

The Employment Working Group (EWG) of Indonesia's G20 Presidency in 2022 received recommendations from C20, in this case, PRAKARSA, regarding strengthening social protection for informal worker groups, reinforcing the quality of skills training for the workforce, and mechanisms for monitoring labor market agreements inclusive for persons with disabilities.



Sepanjang 2022, Indonesia sebagai pemegang keketuaan G20 melalui Pokja Ketenagakerjaan (EWG – G20), menyelenggarakan 3 kali pertemuan yaitu pada bulan Maret secara virtual yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan anggota G20; kedua, pada bulan Mei 2022 secara langsung di Yogyakarta; dan sebagai puncaknya pertemuan menteri-menteri ketenagakerjaan anggota G20 di Bali pada bulan September.

Pada pertemuan kedua dan ketiga, PRAKARSA sebagai Co-Chair dan Sherpa C20 hadir untuk menyampaikan lima belas menit intervensi terkait sejumlah hal, antara lain pentingnya G20 mendorong ekonomi inklusif dan berkelanjutan bagi pekerja di sektor pertanian dan memastikan mekanisme monitoring kesepakatan Argentina tahun 2018 tentang pasar kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas. PRAKARSA juga menyampaikan urgensi anggota G20 melakukan self-reporting atas capaian penguatan pasar kerja bagi penyandang disabilitas setiap 4 tahun sekali.

Throughout 2022, Indonesia, as the chair of the G20, through the Employment Working Group (EWG – G20), organized three meetings. The first meeting was held virtually in March, attended by the representatives of the ministries of labor and employment of G20 members. Furthermore, the second meeting was held in person in May 2022 in Yogyakarta, and the last meeting was held in September in Bali involving the ministers of labor and employment of G20 members.

At the second and third meetings, PRAKARSA, as the Co-Chair and Sherpa of C20, was present to deliver a fifteen-minute intervention regarding several matters. These matters include the significance of the G20 in supporting an inclusive and sustainable economy for workers in the agriculture sector and a mechanism for monitoring the 2018 Argentina agreement on an inclusive labor market for persons with disabilities. PRAKARSA also conveyed the urgency of G20 members to conduct self-reporting on the achievements of strengthening the labor market for persons with disabilities every four years.



Keberhasilan pada pertemuan tersebut berkontribusi pada visi lembaga yang mendorong gagasan inovatif untuk mewujudkan keadilan sosial-ekonomi dan kesejahteraan. Rekomendasi yang diterima oleh Menteri Ketenagakerjaan G20 tidak lepas dari dukungan Kementerian Ketenagakerjaan RI yang selama ini memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan PRAKARSA dan merekognisi sumbangsih PRAKARSA dalam menawarkan ide inovatif terkait kebijakan ketenagakerjaan.

The success of the meeting contributed to the vision of the institution, which encourages innovative ideas to realize socio-economic justice and welfare. The recommendations received by the ministers of labor and employment at the G20 forum were inseparable from the support of the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia, which has established good cooperation with PRAKARSA and recognizes PRAKARSA's contribution to innovative ideas related to labor policy.

Joint Finance Health Task Force of G20 Indonesia 2022 menerima rekomendasi C20 cq PRAKARSA terkait perlunya peran CSOs dalam governing body di Pandemic Fund.

Joint Finance and Health Task Force of the 2022 G20 Indonesia Presidency accepted the recommendation from C20, in this case, PRAKARSA, regarding the need for the role of CSOs in the governing body of the Pandemic Fund.

Joint Finance Health Task Force of G20 Indonesia 2022 menerima masukan untuk melibatkan CSO dalam pembentukan Financial Intermediary Fund (FIF) yang disampaikan dalam media briefing pada September 2022. Keterlibatan organisasi masyarakat dalam pengelolaan Financial Intermediary Fund ini karena PRAKARSA memiliki bukti-bukti keterlibatan organisasi sehingga masyarakat sipil bisa meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, inovasi, dan kepemilikan program ini sampai di level akar rumput atau di level komunitas.

The Joint Finance Health Task Force of 2022 G20 Indonesia received a suggestion to involve CSOs in establishing the Financial Intermediary Fund (FIF), which was delivered at a media briefing in September 2022. The involvement of civil society organizations in managing the Financial Intermediary Fund was encouraged by PRAKARSA's evidence of their involvement, enabling civil society to enhance the program's effectiveness, accountability, innovation, and ownership at the local or grassroots level.

Pendekatan multipihak dan pelibatan peran serta organisasi masyarakat di dalam tata kelola governing body di Pandemic Fund bisa menjadi modalitas agar berjalan lebih efektif dan berdampak bagi

A multi-stakeholder approach and the engagement of civil society organizations in the governance of the governing body in the Pandemic Fund could make the program more effective and impactful in handling the pandemic. Externally, the involvement of civil society



penanganan pandemi. Secara eksternal, keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam pengelolaan FIF juga bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap FIF sehingga benar-benar bisa terhubung antara top approach policy dengan data atau praktiknya.

Keberhasilan pada pertemuan tersebut berkontribusi pada visi lembaga untuk menginisiasi reformasi kebijakan. Rekomendasi yang diterima oleh Joint Finance Health Task Force of G20 Indonesia 2022 tidak lepas dari dukungan Kementerian Kesehatan RI yang selama ini memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan PRAKARSA dan merekognisi sumbangsih PRAKARSA dalam menawarkan ide inovatif terkait kebijakan kesehatan.

organizations in managing FIF could also increase public trust in FIF and enable the top approach policy to be effectively connected to practice or data.

The success of the meeting contributed to the institution's vision to initiate policy reforms. The recommendations received by the Joint Finance Health Task Force of the 2022 G20 Indonesia cannot be separated from the support of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, which has established good cooperation with PRAKARSA and recognizes PRAKARSA's contribution to innovative ideas related to health policy.

PRAKARSA menjadi salah satu “focal point” bagi komunitas CSOs global untuk C20 advocacy dalam G20.

PRAKARSA became one of the “focal points” for the global CSOs community for C20 advocacy in the G20.

Sejak kick-off meeting pada 7-8 Maret 2022, PRAKARSA terus-menerus melakukan mainstreaming di media agar pemimpin G20 menjadikan Presidensi G20 Indonesia sebagai forum yang inklusif dengan memberikan ruang bagi masyarakat sipil di seluruh dunia untuk berperan aktif. Selama 2022, PRAKARSA melakukan berbagai upaya untuk membangun hubungan baik dengan melalui media baik dalam bentuk formal ataupun informal. Sebagai hasilnya, pemberitaan media untuk mendorong G20 sebagai forum inklusif meningkatkan dengan naiknya media citation hingga 172 pemberitaan media online dan media cetak.

Capaian ini merupakan wujud kontribusi terhadap visi PRAKARSA yang berkomitmen pada pengembangan jejaring antar-think-tank, CSOs, pembuat kebijakan

Since the kick-off meeting on March 7-8, 2022, PRAKARSA has continuously carried out mainstreaming in the media to encourage G20 leaders to make Indonesia's G20 Presidency an inclusive forum by allowing for active participation from civil society throughout the world. During 2022, PRAKARSA made various efforts to build good relationships through the media, both in formal and informal forms. As a result, media coverage to promote the G20 as an inclusive forum increased to 172 reports in online media and print media.

This achievement contributed to PRAKARSA's vision: committed to developing networks among think tanks, CSOs, policymakers, and business actors in initiating policy reforms. PRAKARSA's role as one of the chairs and sherpa of C20 also influenced its



dan pelaku bisnis dalam menginisiasi reformasi kebijakan. Peran PRAKARSA sebagai salah satu ketua dan sherpa dalam C20 turut memengaruhi peran aktif PRAKARSA selama Presidensi G20 Indonesia.

Peran PRAKARSA mendapatkan dukungan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia sekaligus Ketua Sherpa Track G20 Indonesia, Airlangga Hartarto pada C20 Summit di Bali 6 Oktober 2022 yang menyatakan Presidensi G20 Indonesia, telah membuka ruang seluas-luasnya bagi C20 dan memandang inklusivitas sebagai salah satu nilai penting yang harus diterapkan. Hal tersebut juga merupakan wujud komitmen Pemerintah Indonesia sebagai Presidensi G20 2022 yang secara aktif melibatkan engagement group seperti C20, sehingga membuat perhatian media massa semakin meningkat.

active role during Indonesia's G20 Presidency.

At the C20 Summit in Bali on October 6, 2022, PRAKARSA received support from the Coordinating Minister of Economic Affairs, Airlangga Hartarto, who was also the Chair of the Sherpa Track of Indonesia's G20 Presidency. He stated that Indonesia's G20 Presidency had provided a wide space for C20 and viewed inclusivity as one of the essential values that must be implemented. This was also the manifestation of the commitment of the Indonesian Government as the 2022 G20 Presidency to actively involving engagement groups such as C20, thereby increasing the attention of the mass media.





Produksi Pengetahuan Laporan Penelitian 2022

Knowledge Production
2022 Research Report



SOCIAL POLICY

Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa/ Kelurahan: Persepsi dan Partisipasi Masyarakat (COVID-19 Handling at the Village/Ward Level: Community Perception and Participation)

Published on June 15, 2022



Penyandang Disabilitas di Tempat Kerja: Kondisi dan Tantangannya di Indonesia sebagai Negara G20 (Persons with Disabilities in the Workplace: Conditions and Challenges in Indonesia as a G20 Country)

Published on June 22, 2022



SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Pelanggaran Hak Warga dan Tanggung Jawab Bank dalam Pembiayaan Industri Semen di Pegunungan Kendeng Utara (Violation of Citizens' Rights and Responsibilities of Banks in Financing the Cement Industry in North Kendeng Mountains)

Published on August 19, 2022



Mendorong Taksonomi Hijau Berkeadilan (Encouraging an Equitable Green Taxonomy)

Published on August 2022



ECONOMIC POLICY

Tracking Global Value Chains (GVCs) on Palm Oil, Fisheries, Rice and Coffee Commodities in Indonesia, Thailand, The Philippines, and Vietnam

Published on September 30, 2022



Penerapan Pajak Kekayaan di Indonesia: Potensi dan Peluang (Implementing Wealth Tax in Indonesia: Potential and Opportunities)

Published on November 2022

POLICY BRIEF 2022 (2022 Policy Briefs)

PB 31

Kebijakan Kuota dan Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pasar Kerja: Jauh Panggang dari Api?

Published on May, 2022



PB 32

Malang Tiada Datang Tunggai: Multi Marginalisasi Penyandang Disabilitas Perempuan pada Pasar Kerja di Indonesia

Published on July, 2022



PB 33

Industri Semen di Pegunungan Kendeng Utara: Kerusakan Lingkungan, Pelanggaran HAM dan Tanggung Jawab Lembaga Keuangan

Published on August, 2022



PB 34

Rantai Nilai Global Sektor Pertanian dan Perikanan di ASEAN: Jalan Panjang Menuju Inklusifitas?

Published on October, 2022



PB 35

Rantai Nilai Global Sektor Pertanian dan Perikanan di ASEAN: Jalan Panjang Menuju Inklusifitas?

Published on November, 2022



PB 36

Pajak Kekayaan: Peluang Integrasi Zakat dan Pajak Untuk Mengatasi Ketimpangan Sosial Ekonomi

Published on December, 2022





Pengaruh Produksi Pengetahuan

Effects of Knowledge Production

Finance Track of G20 (Sustainable Finance Working Group) membuka ruang dialog bagi C20, ResponsiBank dan PRAKARSA untuk menyampaikan rekomendasi kebijakan terkait keuangan berkelanjutan. Hal ini menjadi capaian bagi C20 yang sebelumnya selalu sulit menembus Finance Tracks G20.

The Finance Track of G20 (Sustainable Finance Working Group) opened a dialogue space for C20, ResponsiBank, and PRAKARSA to submit policy recommendations regarding sustainable finance. This is an achievement for C20, who previously had difficulty penetrating the G20 Finance Tracks.

PRAKARSA sebagai Koordinator Taxation and Sustainable Finance Working Group (TSFWG) C20 mendapatkan respons dari UNDP sebagai sekretariat dari SFWG G20 pada pertemuan bilateral untuk menyampaikan rekomendasi kebijakan dari C20 terkait agenda prioritas keuangan berkelanjutan yang akan dibahas pada forum pemimpin G20. Diskusi dilakukan dan dihadiri oleh anggota TSFW C20 dari berbagai organisasi di dunia dan difasilitasi oleh UNDP sebagai sekretariat SFWG G20.

Pertemuan ini merupakan bentuk konkret untuk mencapai misi PRAKARSA yaitu mempromosikan wacana, pengetahuan, dan praktik kebijakan kesejahteraan, khususnya di isu keuangan berkelanjutan dengan memastikan prinsip inklusivitas diterapkan pada proses transisi pembiayaan konvensional ke pembiayaan berkelanjutan. Peran PRAKARSA sebagai Koordinator TSFWG C20

PRAKARSA, as the Coordinator of the C20 Taxation and Sustainable Finance Working Group (TSFWG), received a response from UNDP as the secretariat of the G20 SFWG at a bilateral meeting to submit policy recommendations from C20 regarding the priority agenda for sustainable finance to be discussed at the G20 leaders forum. The discussion was carried out and attended by members of the C20 TSFW from various organizations across the world and facilitated by UNDP as the secretariat of the G20 SFWG.

This meeting was a concrete effort to achieve one of PRAKARSA's mission, which is to promote welfare policy discourses, knowledge, and practices (welfare regime), particularly on sustainable finance issues, by ensuring that the principles of inclusiveness were applied to the process of transitioning conventional financing to sustainable financing. PRAKARSA, as



berkontribusi besar karena melakukan desakan pada UNDP untuk menerima undangan rapat bilateral C20.

Sejumlah jaringan PRAKARSA turut berkontribusi pada terselenggaranya pertemuan tersebut seperti FFA, SOMO, Fair Finance Asia, Rainforest Action Network, Rainforest Foundation Norway, APMDD, IGJ, PWYP Indonesia, Aksi, Yayasan Rumah Energi, Lokataru, dan lain-lain. Faktor eksternal yang menjadi pempu pertemuan tersebut adalah Presidensi G20 Indonesia.

C20 TSFWG Coordinator, made a major contribution by encouraging UNDP to accept the C20 bilateral meeting invitation.

A number of PRAKARSA networks contributed to the process of holding the meeting, including FFA, SOMO, Fair Finance Asia, Rainforest Action Network, Rainforest Foundation Norway, APMDD, IGJ, PWYP Indonesia, Aksi, Yayasan Rumah Energi, Lokataru, and others. The external factor that enabled the meeting was Indonesia's G20 Presidency.

Anggota ResponsiBank menyepakati untuk melakukan studi monitoring komitmen lembaga jasa keuangan dalam pencapaian net zero.

ResponsiBank members agreed to conduct a monitoring study on the commitment of financial service institutions to achieving Net Zero Emissions (NZE).

PRAKARSA bersama ResponsiBank Indonesia berkeinginan kuat untuk memeriksa kemajuan praktik perbankan dalam mitigasi perubahan iklim melalui pembiayaan energi terbarukan untuk mengakselerasi transisi energi guna mempercepat capaian NZE Indonesia. Oleh karenanya, PRAKARSA, WALHI, PWYP, dan Auriga sebagai anggota ResponsiBank Indonesia menyepakati untuk menyelenggarakan penelitian terkait monitoring komitmen lembaga jasa keuangan yang dimulai sejak Agustus 2022.

Kolaborasi penelitian bersama anggota ResponsiBank Indonesia merupakan wujud dari misi PRAKARSA untuk mengembangkan dan memperkuat jejaring antar-OMS dalam inisiasi reformasi kebijakan. Peran

PRAKARSA, together with ResponsiBank Indonesia, determined to examine the progress of banking practices in climate change mitigation through renewable energy financing to accelerate the energy transition for faster progress toward the NZE target in Indonesia. Therefore, PRAKARSA, WALHI, PWYP, and Auriga, as members of ResponsiBank Indonesia, agreed to conduct a monitoring study on the commitment of financial service institutions as of August 2022.

The research collaboration with ResponsiBank Indonesia members manifested the PRAKARSA's mission to develop and strengthen the network among CSOs in initiating policy reforms. As

PRAKARSA sebagai Koordinator ResponsiBank adalah mengonsolidasikan anggota ResponsiBank serta memimpin langsung proses studi. Kemampuan PRAKARSA dalam menyelenggarakan studi menjadikan proses yang dilakukan lebih terarah dan sesuai dengan standar.

Komitmen anggota ResponsiBank tentunya menjadi faktor yang mendorong kolaborasi studi ini dilakukan. Anggota ResponsiBank juga merupakan organisasi-organisasi yang juga memberikan perhatian yang sangat tinggi pada isu-isu energi rendah karbon. Faktor yang mendorong terwujudnya kolaborasi ini adalah karena tren perbankan nasional yang menguat terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta komitmen NDC Indonesia.

ResponsiBank Coordinator, PRAKARSA took a role in consolidating ResponsiBank members and directly led the study process. PRAKARSA's capability to conduct studies enabled the process to be more directed and by standards.

The commitment of ResponsiBank members was certainly a supportive factor in carrying out this study collaboration. Moreover, ResponsiBank members were organizations that paid close attention to low-carbon energy issues. The collaboration could be established due to the strengthening of national banking trends related to climate change mitigation and adaptation, as well as Indonesia's NDC commitment.

Publik memberikan perhatian yang tinggi terhadap isu lansia yang disebarluaskan oleh PRAKARSA, terbukti dengan diaksesnya laporan riset dan berita mengenai isu kelangkaan oleh lebih dari 3.000 pembaca sepanjang tahun 2022.

The public paid great attention to the elderly issue disseminated by PRAKARSA, corroborated by the number of access to research reports and news on the said issue by more than 3,000 readers in 2022.



Isu kelangkaan merupakan salah satu perhatian PRAKARSA terutama sejak 2018. Pada tahun 2021, PRAKARSA meluncurkan laporan riset mengenai kesejahteraan lansia di Indonesia. Penelitian ini melihat kondisi kesejahteraan lansia berdasarkan Framework OECD for Measuring Well-being dan UN Principles for Older Person. Penelitian ini dilakukan

The elderly issue has been one of PRAKARSA's concerns, specifically since 2018. In 2021, PRAKARSA released a study report on the welfare of the elderly in Indonesia. This study observed the welfare conditions of the elderly based on the OECD Framework for Measuring Well-being and the UN Principles for Older Persons. This study aimed to

guna mengetahui kondisi kesejahteraan lansia dan program perlindungan sosial lansia di Indonesia dan diharapkan dapat memperkuat bukti bagi pemerintah dalam mempersiapkan periode ledakan lansia yang akan dimulai tahun 2030. Laporan studi kemudian didistribusikan melalui kanal sosial media seperti Facebook, LinkedIn, Twitter, website, repositori PRAKARSA, maupun Instagram baik yang berbayar ataupun tidak serta menghubungkan pembaca ke halaman website ataupun repositori PRAKARSA. Secara statistik, jumlah pengunjung dan pembaca terkait publikasi laporan ataupun advokasi isu lansia tersebut menembus lebih dari 3.000 pembaca.

Penyebarluasan hasil studi ini berkontribusi pada upaya untuk mewujudkan misi PRAKARSA dalam hal mempromosikan wacana, pengetahuan, dan praktik kebijakan kesejahteraan. Peran PRAKARSA dalam penyebarluasan isu kelansiaan didukung oleh komitmen dan kapasitas Tim PRAKARSA yang mumpuni dan andal dalam melakukan riset dan promosi media.

Dukungan eksternal termasuk pendanaan dari HIVOS dan para penggiat isu kelansiaan merupakan pendorong PRAKARSA dalam mencapai keberhasilan ini. Selain itu, isu kelansiaan turut menjadi tren terutama akibat hilangnya RUU Kelansiaan pada Prolegnas Tahun 2021.

identify the welfare of the elderly and their social protection program in Indonesia. The study result was expected to strengthen the evidence for the government in preparing for the elderly population spike period, which was predicted to begin in 2030. The study report was distributed through social media platforms, such as Facebook, LinkedIn, Twitter, websites, PRAKARSA's repositories, and Instagram, through paid and unpaid campaigns, and it connected the readers to PRAKARSA's website page or repository. Statistically, the number of visitors and readers on the publication of reports or advocacy on elderly issues reached more than 3,000 readers.

The dissemination of the study result contributed to realizing PRAKARSA's mission of promoting welfare policy discourses, knowledge, and practices. PRAKARSA's role in disseminating the elderly issues was supported by the commitment and capacity of the PRAKARSA's Team, which was qualified and reliable in conducting research and media promotion.

External support, including funding from HIVOS and the activists on the elderly issues, became the impetus for PRAKARSA in achieving this success. In addition, the issue of the elderly gained attention, mainly due to the disappearance of the Bill on Elderly in the 2021 National Legislation Program (Prolegnas).

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI mendukung pajak kekayaan untuk dibahas lebih lanjut di Komisi XI yang dinyatakan saat peluncuran hasil penelitian tentang potensi dan peluang penerapan pajak kekayaan di Indonesia .

Deputy Chairman of Commission XI of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI) promoted wealth tax to be further discussed at Commission XI, as stated at the release of research results on the potential and opportunities for wealth tax implementation in Indonesia

PRAKARSA pada 2022 menyelesaikan penelitian bertajuk "Penerapan Pajak Kekayaan di Indonesia: Potensi dan Peluang" yang didukung oleh Human Act. Hasil dari studi tersebut digunakan sebagai bahan untuk advokasi kebijakan dalam mendorong pajak kekayaan sebagai strategi alternatif meningkatkan pendapatan negara khususnya untuk penanganan pandemi. Pada peluncuran hasil penelitian pada tanggal 23 September 2022, PRAKARSA mengundang berbagai pihak termasuk DJP dan Komisi XI DPR RI.

In 2022, PRAKARSA completed a study entitled "Implementation of Wealth Tax in Indonesia: Potential and Opportunities" with the support of the Human Act. The study results were employed as material for policy advocacy in supporting wealth tax as an alternative strategy to increase state revenue, specifically for handling a pandemic. At the release of the research results on September 23, 2022, PRAKARSA invited various parties, including the Directorate General of Taxes (DJP) and Commission



Peluncuran Hasil Penelitian dan Diskusi Publik
Menakar Gagasan Penerapan Pajak Kekayaan di Indonesia

Salah satu hasil penting dalam studi adalah simulasi skema pajak kekayaan salah satunya adalah Sistem Pajak Progresif 1%-2% bagi yang memiliki kekayaan lebih dari 10 juta USD atau Rp144 miliar. Dengan asumsi sekitar 4.600 orang memiliki kekayaan di atas threshold tersebut, pajak berpotensi meningkat sebesar 78,5 triliun rupiah, di mana 100 orang terkaya menyumbang 60,2 triliun rupiah dan yang lain akan membayar 18,4 triliun rupiah. Jumlah tersebut senilai 6,15 persen dari realisasi penerimaan pajak tahun 2021.

Hasil penelitian PRAKARSA tentang pajak kekayaan di Indonesia berkontribusi terhadap visi dan misi PRAKARSA untuk turut berkontribusi dalam pemecahan masalah Indonesia, yakni kapasitas fiskal yang lemah dan ketimpangan dengan ide berupa pajak kekayaan sebagai gagasan transformatif untuk mewujudkan keadilan sosial-ekonomi dan kesejahteraan. Peran PRAKARSA ini tidak lepas dari komitmen dan kredibilitas PRAKARSA dan timnya yang memiliki kualifikasi dalam hal perpajakan dan ekonomi.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPR RI menyatakan dukungannya secara verbal terhadap inisiasi PRAKARSA tentang pajak kekayaan di Indonesia untuk dibahas lebih lanjut di Komisi XI DPR RI. Faktor eksternal yang mendorong dikembangkannya studi ini adalah situasi fiskal negara di masa pandemi yang membutuhkan adanya diskursus dan ide-ide segar untuk mengatasi pandemi.

XI DPR RI. One prominent study result delineated a simulation of a wealth tax scheme, one of which is a Progressive Tax System of 1%-2% for those with a wealth of more than USD10 million or Rp144 billion. Assuming 4,600 people have wealth above this threshold, the tax has the potential to increase by Rp78.5 trillion, meaning that if the 100 wealthiest Indonesians contribute Rp60.2 trillion, the others will have to pay Rp18.4 trillion. It equals 6.15 percent of the realization of Indonesia's tax revenues in 2021.

The results of PRAKARSA's study on wealth tax in Indonesia contributed to achieving PRAKARSA's vision and mission in solving Indonesia's problems, including weak fiscal capacity and inequality, by promoting wealth tax as a transformative idea to realize socio-economic justice and welfare. PRAKARSA's role could not be separated from its commitment, credibility, and its team, who have qualifications in taxation and economics.

On that opportunity, the Deputy Chairman of Commission XI of DPR RI verbally expressed his support for PRAKARSA's initiative on wealth tax in Indonesia to be further discussed at Commission XI of DPR RI. The external factor that prompted the development of this study was the country's fiscal situation during the pandemic, which required innovative discourses and ideas to overcome the said situation.

Antusiasme publik untuk mengetahui hak masyarakat atas lahan adat di wilayah Pegunungan Kendeng, Kabupaten Pati, meningkat, di mana 1 juta orang tercatat menonton film dokumenter masyarakat Kendeng pada tahun 2022.

Public enthusiasm for understanding the community's right to indigenous territory in the Kendeng Mountains region, Pati District, increased, as one million people were recorded watching documentaries about Kendeng people in 2022.

Film Dokumenter

Lagi-lagi Pabrik Semen: Petani Pati Terancam



Pada November 2021, PRAKARSA menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas jurnalis dalam melakukan investigasi terkait isu-isu lingkungan dan aliran pendanaan dari perbankan bagi perusahaan yang mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan, sosial, ekonomi, dan lainnya. Pelatihan ini diberikan oleh investigator andal Center for Investigative Journalism (CIJ) yang berpengalaman dalam investigasi dan pembuatan film dokumenter sejak 2003. Di akhir pelatihan, para jurnalis berkesempatan mendapatkan small grant untuk melakukan investigasi kasus yang dituangkan dalam film dokumenter. PRAKARSA dan CIJ kemudian menyeleksi proposal kasus dari peserta yang akan diinvestigasi dan dikembangkan dalam film. Salah satu proposal yang masuk dalam shortlist adalah kasus terkait pelanggaran HAM pada pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Kabupaten Pati. Film dokumenter tersebut kemudian ditayangkan pada Narasi TV, Bata TV, dan pada channel YouTube PRAKARSA dan hingga saat

In November 2021, PRAKARSA organized training to increase the journalists' capacity to carry out investigations related to environmental issues and the flow of funding from banks to companies with negative environmental, social, economic, and other impacts. The training was mentored by a reliable investigator from the Center for Investigative Journalism (CIJ) with experience in investigation and documentary filmmaking since 2003. At the end of the training, the journalists got the opportunity to receive a small grant to conduct the case investigation to be narrated in documentaries. Further, PRAKARSA and the CIJ selected the cases proposed by the participants to be investigated and developed into films. One of the proposals included in the shortlist was a case about human rights violations in the construction of a cement factory in Kendeng Mountains, Pati District. The documentaries were then broadcasted on Narasi TV, Bata TV, and PRAKARSA's YouTube channel and, to date, have been watched by up to one million viewers.

ini telah ditonton hingga 1 juta kali.

Capaian ini berkontribusi sejalan dengan misi PRAKARSA yaitu memproduksi dan mempromosikan wacana, pengetahuan, dan praktik kebijakan kesejahteraan serta pengembangan kapasitas, pendidikan, dan pelatihan bagi pemangku kepentingan. Capaian ini dilakukan karena PRAKARSA merupakan anggota koalisi FFA dan FFI di mana dukungan peningkatan kapasitas oleh para mitra FFA dan FFI diberikan secara intensif.

Dari sisi dukungan eksternal, komitmen CIJ dalam memberikan pelatihan bagi jurnalis sangat efektif untuk meningkatkan kapasitas jurnalis yang berdampak langsung pada publikasi aktual. Selain itu, pada 2022, kasus mengenai pabrik semen di Pegunungan Kendeng mendapatkan animo dari publik sehingga tuntutan akan informasi semakin tinggi.

This achievement corresponded to PRAKARSA's mission of producing and promoting welfare policy discourses, knowledge, and practices, as well as organizing capacity building, education, and training for stakeholders. PRAKARSA managed to achieve this goal because it was a member of the Fair Finance Asia (FFA) and Fair Finance International (FFI) coalition, where capacity-building support by FFA and FFI partners was provided intensively.

Regarding external support, CIJ's commitment to providing training for the journalists was significantly effective in increasing their capacity, which directly impacted actual publications. Besides, in 2022, the case of the cement factory in the Kendeng Mountains attracted public attention, causing an increased demand for information.



Buku terbitan PRAKARSA menjadi salah satu rujukan: Universitas Multimedia Nusantara menjadikan Buku Panduan Jurnalis Isu Kesehatan sebagai rujukan penyusunan silabus Mata Kuliah Komunikasi Kesehatan.

The book published by PRAKARSA became a reference: Universitas Multimedia Nusantara referred to Buku Panduan Jurnalis Isu Kesehatan (Handbook for Journalists on Health Issues) for preparing the syllabus for Health Communication Course.

Pada akhir tahun 2022, buku terbitan PRAKARSA yang berjudul Buku Panduan Jurnalis Isu Kesehatan tahun 2016 dijadikan rujukan untuk pembuatan silabus Jurnalisme Kesehatan oleh Kepala Program Studi Journalistik Fikom UMN. Capaian ini berkontribusi pada visi PRAKARSA yakni memelopori munculnya ide-ide inovatif dan transformatif untuk mewujudkan keadilan sosial-ekonomi dan kesejahteraan. Hal ini juga didukung oleh komitmen dan konsistensi PRAKARSA untuk terus memproduksi produk-produk dan mempromosikan wacana, pengetahuan, dan praktik kebijakan kesejahteraan kepada masyarakat secara umum.

At the end of 2022, a book published by PRAKARSA entitled Buku Panduan Jurnalis Isu Kesehatan in 2016 became a reference for preparing the Health Journalism syllabus by the Head of the Journalism Study Program, Faculty of Communication, Universitas Multimedia Nusantara. This accomplishment contributed to the PRAKARSA's vision of initiating innovative and transformative ideas to realize socio-economic justice and welfare. It was also supported by PRAKARSA's commitment and consistency to constantly deliver outcomes and promote welfare policy discourses, knowledge, and practices to society.



Penguatan Jejaringan Multi-Pihak: Engagement dengan Sektor Swasta Meningkat

Strengthening of Multistakeholder Network: Increased Engagement with the Private Sector

Golden Agri Resources (GAR) sebagai salah satu perusahaan kelapa sawit terbesar bersedia untuk berdiskusi dengan PRAKARSA terkait tema inklusif bisnis di sektor pertanian.

Golden Agri Resources (GAR), one of the largest palm oil companies, was willing to discuss with PRAKARSA regarding the inclusive business in the agricultural sector.

Saat pelaksanaan riset GVC, terdapat kesulitan untuk mengumpulkan data dalam bentuk wawancara, khususnya data yang bersumber langsung dari pihak perusahaan. Oleh karenanya, PRAKARSA berupaya untuk melakukan pendekatan dengan sektor swasta untuk menyampaikan hasil temuan riset sebagai proses advokasi perbaikan praktik dan kebijakan. Upaya tersebut membuahkan hasil sehingga pertemuan antara PRAKARSA dan GAR terlaksana pada 18 Oktober 2022. Dalam pertemuan tersebut, GAR merespons pemaparan hasil riset PRAKARSA dan bersedia untuk mengkaji lebih lanjut hasil temuan studi PRAKARSA.

Pendekatan dengan sektor swasta merupakan bentuk perluasan jaringan yang dilakukan sesuai dengan salah satu misi PRAKARSA yaitu mengembangkan jejaring antar-think-tank, CSOs, dan swasta dalam menginisiasi reformasi kebijakan. Keberhasilan PRAKARSA dalam menyelenggarakan pertemuan dengan GAR adalah buah dari keanggotaan

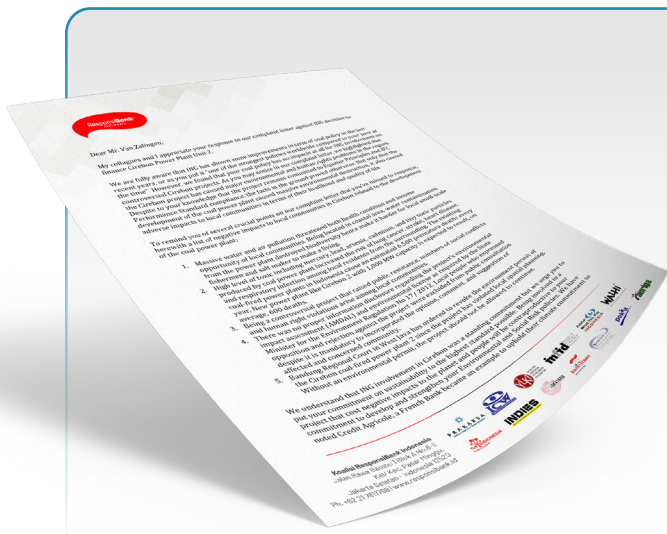
During the GVC research, there were difficulties in collecting data in the form of interviews, especially the data sourced directly from the company. Therefore, PRAKARSA sought to approach the private sector to present the research findings as an advocacy process for improving practices and policies. Such an attempt was successfully executed, leading to the meeting between PRAKARSA and GAR on October 18, 2022. In the meeting, GAR responded to the presentation of PRAKARSA's research results and was willing to study them further.

The approach with the private sector, as network expansion, was carried out in accordance with one of PRAKARSA's missions, i.e., developing networks between think tanks, CSOs, and the private sector in initiating policy reforms. PRAKARSA succeeded in holding a meeting with GAR due to its membership in the Asian philanthropic network, the Asian Venture Philanthropy Network (AVPN).

PRAKARSA pada jaringan filantropi Asia yaitu Asian Venture Philanthropy Network (AVPN).

Pertemuan ini terjadi karena pihak GAR bersedia untuk melakukan dialog dengan PRAKARSA terkait hasil studi yang sudah dilaksanakan. Faktor yang mendorong GAR untuk berdiskusi adalah adanya tren dan tekanan untuk perusahaan sawit bekerja secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

The meeting occurred since GAR was willing to have a dialogue with PRAKARSA regarding the study results. The factor stimulating GAR to start a discussion was the trend and pressure for palm oil companies to work responsibly and sustainably.



Bank ING yang membiayai PLTU Cirebon unit 1 dan 2 membuka ruang dialog secara langsung dengan Koalisi ResponsiBank Indonesia dan masyarakat terdampak pembangunan PLTU dan komitmen meningkatkan grievance mechanism and human rights due diligence.

ING Bank, which financed units 1 and 2 of the Steam Power Plant (PLTU) in Cirebon, opened a space for direct dialogue with the ResponsiBank Indonesia Coalition and communities affected by the construction of the PLTU and as a form of commitment to improving the grievance mechanism and human rights due diligence.

Sejak 2017, PRAKARSA sebagai Koordinator Koalisi ResponsiBank bersama dengan masyarakat terdampak PLTU Cirebon mengirimkan komplain kepada ING yang merupakan lead sindikasi pembiayaan proyek tersebut. Koalisi ResponsiBank menyoroti inkonsistensi yang dilakukan ING dengan membiayai proyek kontroversial dan berupaya untuk mengubah praktik pembiayaan perbankan agar lebih bertanggung jawab sehingga tidak lagi merugikan masyarakat di sekitar pembangunan proyek serta memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Komplain yang dikirimkan sejak tahun 2017 tidak ditanggapi serius sehingga Koalisi ResponsiBank kembali mengirimkan komplain pada 2018 dan 2021. Hingga pada Juni 2022, ING Belanda dan Singapore datang ke Jakarta dan bertemu secara langsung dengan Koalisi ResponsiBank Indonesia dan masyarakat terdampak untuk mendiskusikan tuntutan dari pihak komunitas.

Pertemuan tersebut menghasilkan bukti upaya untuk mencapai visi PRAKARSA yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial-ekonomi dan kesejahteraan.

Since 2017, PRAKARSA, as the Coordinator of the ResponsiBank Coalition and the affected communities of PLTU in Cirebon, has submitted complaints to ING Bank, the syndicated lead for project financing. The ResponsiBank Coalition highlighted the ING Bank's inconsistency in financing controversial projects and further attempted to change banking financing practices to be more responsible; therefore, they would no longer harm the communities around the project development and also paid attention to environmental, social, and governance aspects. As the complaints made since 2017 were not taken seriously, the ResponsiBank Coalition sent another complaint in 2018 and 2021. Eventually, in June 2022, ING Netherlands and Singapore came to Jakarta and met directly with the ResponsiBank Indonesia Coalition and the affected communities to discuss their demands.

The meeting generated evidence of efforts to achieve PRAKARSA's vision to realize socio-economic justice and welfare. These prolonged advocacy efforts were intertwined with PRAKARSA's

Upaya panjang advokasi ini tidak dapat dilepaskan dari konsistensi PRAKARSA sebagai Koordinator ResponsiBank untuk mengkonsolidasikan anggota koalisi dan mengawal advokasi PLTU Cirebon sejak 2017. Selain itu, Fair Finance Netherland di mana Headquarter ING berada memberikan dukungan penuh kepada ResponsiBank Indonesia dengan memberikan input dan masukan mengenai bagaimana advokasi langsung dilakukan. Faktor lainnya yang mendorong pertemuan tersebut adalah adanya tren global lembaga keuangan untuk shifting pembiayaan yang berkelanjutan, termasuk berkontribusi pada pembiayaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab.

consistency as ResponsiBank Coordinator to consolidate coalition members and oversee the advocacy of PLTU in Cirebon since 2017. In addition, Fair Finance Netherland, where the ING headquarter is located, provided full support to ResponsiBank Indonesia by providing input and suggestions on how to direct advocacy to be carried out. Another factor driving the meeting was the global trend of financial institutions for sustainable financing shifting, including contributing to climate change mitigation and adaptation financing as well as more responsible business practices.

Kerja sama dengan PT Surveyor Indonesia dalam pengarusutamaan sustainable business telah dimulai dan akan diperkuat pada 2023.

Collaboration with PT Surveyor Indonesia in mainstreaming sustainable business has started and will be reinforced in 2023.

PRAKARSA bersama PT Surveyor Indonesia dan Koalisi Forest and Finance menggelar dialog kebijakan untuk mendorong kebijakan sektor keuangan memitigasi risiko terkait alam dan iklim serta meningkatkan kualitas tata kelola sumber daya alam (SDA) pada November 2022. Dialog kebijakan ini mendiskusikan risiko sistemik yang dihadapi Indonesia terkait dampak lingkungan dan sosial serta bagaimana agenda ini dapat diselaraskan dengan upaya memperkuat tata kelola sumber daya alam, meminimalkan kerugian negara, dan memberantas korupsi serta kebijakan yang efektif untuk mengurangi risiko sistemik.

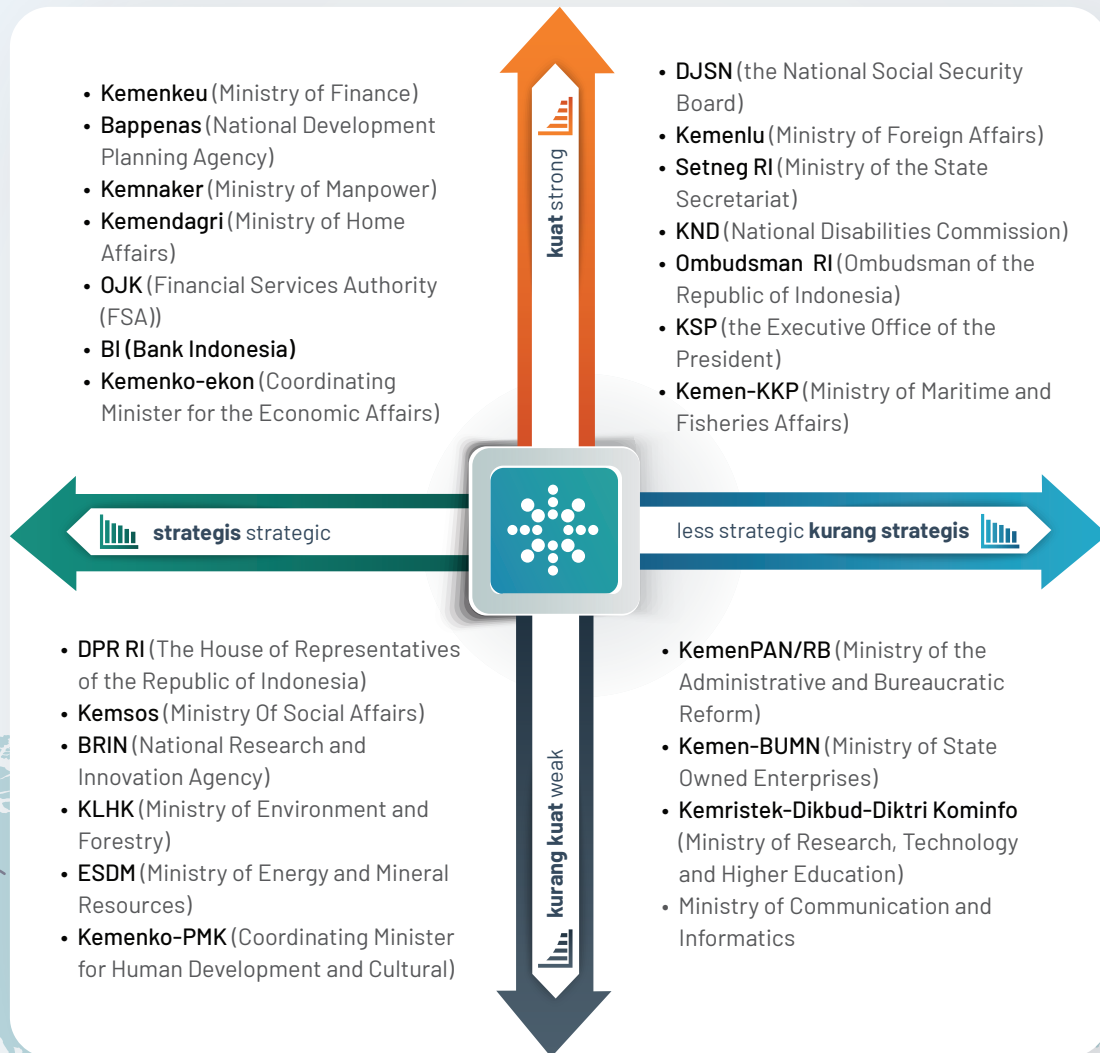
Kegiatan ini diarahkan sebagai forum multipihak dan berkontribusi pada visi PRAKARSA dalam mengembangkan jejaring antar-think-tank, CSOs, dan swasta dalam menginisiasi reformasi kebijakan. PT Surveyor Indonesia mendukung setiap langkah dan kebijakan regulator sektor keuangan dan bank sentral yang beberapa di antaranya dilontarkan dalam bentuk gagasan kebijakan oleh Network for Greening the Financial System (NGFS). Melalui layanan jasa sustainability, PT Surveyor Indonesia mendukung program-program pemerintah dalam sektor keuangan berkelanjutan.

PRAKARSA, PT Surveyor Indonesia, and the Forest and Finance Coalition held a policy dialogue to encourage financial sector policies to mitigate risks related to nature and climate and improve the quality of natural resources governance in November 2022. This policy dialogue discussed the systemic risks that Indonesia should face regarding environmental and social impacts and how this agenda could be aligned with efforts to strengthen natural resource governance, minimize state losses, eradicate corruption, and formulate effective policies to reduce systemic risks.

This activity was intended to be a multistakeholder forum, which contributed to PRAKARSA's vision of developing networks between think tanks, CSOs, and the private sector in initiating policy reforms. PT Surveyor Indonesia supported every step and policy of the financial sector regulator and Central Bank, some of which were put forward in the form of policy ideas by the Network for Greening the Financial System (NGFS). Through sustainability services, PT Surveyor Indonesia supported the Government's programs in the sustainable finance sector.

Kuadran Engagement PRAKARSA dengan K/L

PRAKARSA Engagement Quadrant with Ministries/agencies



Catatan: (1) Strategis dan kurang strategis didasarkan pada fokus isu PRAKARSA; (2) kuat dan kurang kuatnya: kolaborasi, ahli, narasumber, dan undangan.



Pelatihan dan Penguatan Kapasitas

Training and Capacity Building

Pelatihan analisis kebijakan berbasis bukti dan penulisan policy brief: 55 analis kebijakan di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengikuti pelatihan di Regional Sumatera (Pekanbaru, Mei 2022) dan Indonesia bagian tengah dan timur (Kupang, Oktober 2022).

Evidence-based policy analysis training and policy brief writing: 55 policy analysts in provincial and district/ city governments participated in training in the Sumatra Region (Pekanbaru, May 2022) and central and eastern Indonesia (Kupang, October 2022)

Polpum Kemendagri RI memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur yang lebih kompeten sehingga pemerintahan daerah dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif. Atas hal tersebut, PRAKARSA yang memiliki hubungan kerja sama dengan Dirjen Polpum Kemendagri mengadakan sejumlah pelatihan bagi analis kebijakan dari beberapa daerah yang diikuti oleh 67 orang peserta pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Meskipun PRAKARSA memberikan pembiayaan untuk pelaksanaan pelatihan tersebut yang bersumber dari dukungan donor, terdapat tiga peserta dari Pemprov Jawa Timur yang melakukan pembiayaan mandiri untuk mengikuti pelatihan ini.

Keberhasilan dalam mendukung peningkatan kapasitas ASN merupakan komitmen PRAKARSA yang tertuang dalam misi PRAKARSA yaitu

The Directorate General of Politics and Public Administration of the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia (Polpum Kemendagri RI) intended to increase the apparatus capacity to be more competent so that local governments could realize good, clean, and effective governance. Accordingly, PRAKARSA, which collaborated with the Directorate General of Polpum Kemendagri RI, held some training for policy analysts from several regions, which were attended by 67 local government participants at the province and district/ city levels. Although PRAKARSA provided funding for the training implementation from donor support, three participants from the East Java Provincial Government funded themselves to attend the training.

Successfully supporting the capacity building of State Civil Apparatus (ASN) was part of PRAKARSA's



pengembangan kapasitas, pendidikan, dan pelatihan bagi pemangku kepentingan. Sebagai penyelenggara, PRAKARSA memiliki kapasitas yang sangat mumpuni dalam memberikan pelatihan terkait dengan analisis kebijakan dan penyusunan dokumen ringkasan kebijakan dan dokumen pendukung kebijakan lainnya.

Selain dukungan serta komitmen langsung dari Dirjen Polpum Kemendagri, kebutuhan dari berbagai pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memproduksi kebijakan berbasis bukti merupakan dasar terwujudnya capaian ini.

commitment specified in its mission, namely capacity building, education, and training for stakeholders. As an organizer, PRAKARSA had a remarkably qualified capacity to provide training related to policy analysis and preparation of policy summary documents as well as other policy support documents.

In addition to the direct support and commitment from the Directorate General of Polpum Kemendagri RI, the need for local governments to increase the Government capacity to produce evidence-based policies served as the basis for realizing this achievement.

Pelatihan advokasi kebijakan berbasis bukti: 8 organisasi masyarakat sipil yang bekerja pada isu disabilitas mengikuti dan berhasil menyusun tiga dokumen policy brief sebagai bahan advokasi pada hari disabilitas internasional tahun 2022 (Yogyakarta, November 2022).

Evidence-based policy advocacy training: eight civil society organizations working on disability issues participated in and succeeded in compiling three policy briefs as advocacy material for the 2022 international disability day (Yogyakarta, November 2022).



OHANA, organisasi penyandang disabilitas yang berbasis di Jogjakarta mengundang PRAKARSA untuk memberikan pelatihan advokasi kebijakan berbasis bukti yang dihadiri oleh 8 OMS yang bekerja

OHANA, an organization of persons with disabilities based in Jogjakarta, invited PRAKARSA to provide evidence-based policy advocacy training attended by eight CSOs working on disability issues on November

di isu penyandang disabilitas pada 22–25 November 2022. Pelatihan ini kemudian menghasilkan tiga dokumen ringkasan kebijakan yang akan digunakan sebagai bahan diskusi kebijakan pada Hari Disabilitas Internasional tanggal 3 Desember 2022.

Pelatihan yang dihadiri PRAKARSA sebagai fasilitator utama merupakan kontribusi pada misi PRAKARSA yaitu mengembangkan jejaring antar-think-tank, CSOs, dan swasta dalam menginisiasi reformasi kebijakan, salah satunya yakni kebijakan yang berpihak pada penyandang disabilitas. Peran yang diberikan ini merupakan hasil dari reputasi dan kredibilitas PRAKARSA yang secara konsisten menerbitkan pengetahuan berbasis riset yang dikembangkan ke dalam dokumen advokasi kebijakan.

Secara eksternal, OHANA merupakan pihak yang turut mendukung PRAKARSA untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada sesama CSO. Dukungan ini muncul karena pendiri OHANA dan Anggota Komite Penyandang Disabilitas PBB, Ibu Risnawati, merekognisi karya PRAKARSA dan membaca sejumlah publikasi PRAKARSA khususnya hasil riset dan policy brief. Selain itu, Hari Disabilitas Internasional merupakan momentum yang akan dimanfaatkan oleh organisasi-organisasi penyandang disabilitas untuk melakukan gerakan advokasi kolektif membutuhkan peningkatan kapasitas advokasi berbasis bukti.

22–25, 2022. This training further produced three policy summary documents used as material for policy discussion on the International Day of Persons with Disabilities on December 3, 2022.

The training attended by PRAKARSA as the leading facilitator contributed to PRAKARSA's mission of developing networks between think tanks, CSOs, and the private sector in initiating policy reforms, one of which is a policy supporting persons with disabilities. This role was assigned considering PRAKARSA's reputation and credibility, which consistently publishes research-based knowledge developed into policy advocacy documents.

OHANA supported PRAKARSA in sharing knowledge and experience with their fellow CSOs. This support was provided after the founder of OHANA and a member of the UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities, Ibu Risnawati, recognized and read PRAKARSA's work and publications, especially its research results and policy briefs. Apart from that, the International Day of People with Disabilities became a momentum that the organizations of people with disabilities used to carry out collective advocacy movements requiring evidence-based advocacy capacity building.



Pelatihan analisis kebijakan dan penulisan policy brief bagi 17 organisasi masyarakat sipil anggota Publish What You Pay (PWYP) di berbagai daerah yang bergerak di isu advokasi kebijakan sektor ekstraktif dan SDA (Jakarta-daring, Juli 2022).

Training on policy briefs analysis and formulation for 17 CSOs members of Publish What You Pay (PWYP) in various regions working on policy advocacy issues for the extractive and natural resources sectors (Jakarta - online, July 2022)

Tujuh belas organisasi masyarakat sipil yang termasuk anggota PWYP (Publish What You Pay) yang bekerja di isu tata kelola sumber daya alam dan ekstraktif mengikuti pelatihan advokasi kebijakan berbasis bukti pada 19–20 Juli 2022 serta berhasil menyusun lima draf dokumen policy brief sebagai bahan advokasi mereka.

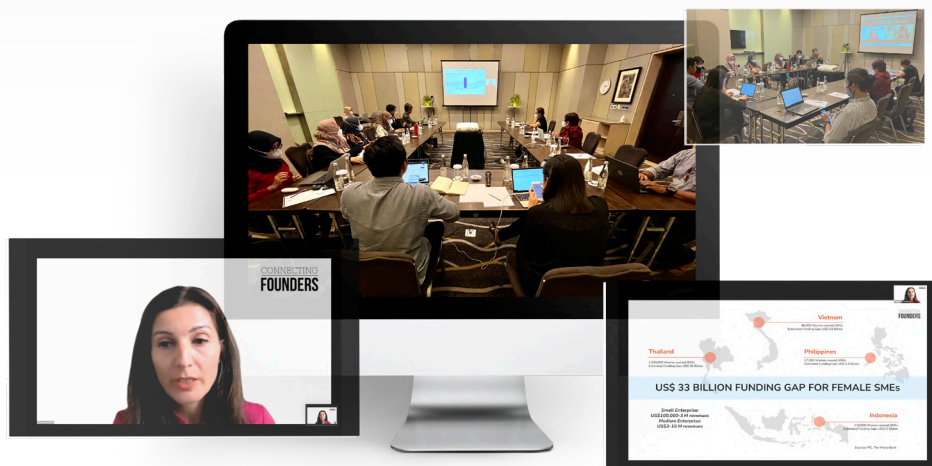
On July 19 - 20, 2022, 17 CSOs, as members of PWYP (Publish What You Pay) working on issues of natural resources and extractive management, participated in the training on evidence-based policy advocacy and successfully compiled five brief policy drafts as their advocacy material.

PWYP adalah lembaga masyarakat sipil yang berbasis di Jakarta dan beranggotakan 17 OMS di berbagai daerah di Indonesia. Dalam pelatihan ini, tiap OMS mengirimkan 2-3 orang peserta sebagai peserta untuk memperkuat kemampuan analisis dan menulis policy brief mereka. PWYP adalah rekan kerja PRAKARSA dalam berbagai koalisi di mana kedua lembaga ini terlibat bersama dalam advokasinya, misalnya dalam Koalisi ResponsiBank Indonesia dan juga bersama-sama merupakan mitra program BUILD dari Ford Foundation. Pelatihan ini juga dilakukan dalam kerangka program BUILD dan dilakukan secara daring karena kenaikan angka Covid-19 pada saat itu.

PWYP is a civil society organization domiciled in Jakarta with 17 CSO members in various regions across Indonesia. In this training, each CSO was represented by two or three participants to enhance the organizations' ability to analyze and formulate their policy briefs. PWYP is PRAKARSA's partner in various coalitions where the two institutions are involved in advocacy-related issues, for instance, in the ResponsiBank Indonesia coalition and the BUILD program by the Ford Foundation. The training was also organized within the BUILD program framework and conducted online due to the increase in the COVID-19 rate at the moment.

Pelatihan pengarusutamaan isu gender pada institusi/industri keuangan: Bank BRI, Bank Victoria, Bank Bukopin, Bank BSI, Bank OCBC, Bank CIMB Niaga, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Kementerian Keuangan, dan sejumlah OMS menghadiri pelatihan terkait yang diselenggarakan PRAKARSA/ ResponsiBank (Jakarta, Juli 2022).

Gender mainstreaming training for financial institutions/industries: Bank BRI, Bank Victoria, Bank Bukopin, Bank BSI, Bank OCBC, Bank CIMB Niaga, Indonesia's Banking Development Institute (LPPI), Ministry of Finance, and several CSOs attended the training organized by PRAKARSA/ResponsiBank (Jakarta, July 2022)



Pada pertengahan tahun 2022, Pemerintah Indonesia menerbitkan Panduan Taksonomi Hijau untuk mendorong transisi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sebagai living dokumen, Taksonomi Hijau Indonesia belum mempertimbangkan berbagai aspek inklusivitas termasuk kesetaraan gender dan HAM. Padahal, isu gender merupakan bagian penting ESG, khususnya di aspek sosial. Pengarusutamaan gender di sektor keuangan bisa meningkatkan

In mid-2022, the Government of Indonesia published the Green Taxonomy Guide to promote a just and sustainable transition. As a living document, Indonesia's Green Taxonomy has not included various aspects of inclusiveness, including gender equality and human rights. In fact, gender issues serve as an essential part of the Environmental, Social and Governance (ESG) principles, especially in the social aspect. Gender mainstreaming can increase

perbaikan dan kemajuan di dalam industri keuangan itu sendiri serta bisa lebih bertanggung jawab dalam menjalankan prinsip ESG di dalam bisnisnya. Oleh karenanya, atas dukungan FFA dan Connecting Founders, PRAKARSA mengundang sektor perbankan, pemerintah, dan CSO untuk mengikuti pelatihan pengarusutamaan gender di sektor perbankan.

Terselenggaranya kegiatan ini berkontribusi pada visi dan misi PRAKARSA untuk mempromosikan wacana, pengetahuan, dan praktik kebijakan yang sejahtera dan berkeadilan. Peran PRAKARSA sebagai Koordinator ResponsiBank Indonesia yaitu koalisi nasional yang melakukan advokasi perbaikan kebijakan dan praktik pada lembaga keuangan. ResponsiBank Indonesia merasa perlu untuk memperkuat kegiatan bisnis baik skala kecil ataupun besar dengan standar policy and practices terkait persentase female leadership, board member dalam perusahaan. Permintaan investor dan tekanan regulasi adalah dua faktor utama yang mendorong lebih banyak G&I (gender diversity and inclusion) dalam sektor bisnis. Selain itu, gender memengaruhi performa investasi jangka panjang.

Jaringan eksternal yang menjadi pendorong tercapainya keberhasilan ini adalah FFA, Connecting Founders, OJK, dan sejumlah bank yang beroperasi di Indonesia yang selama ini telah di-engage PRAKARSA. Selain itu, terbitnya Taksonomi Hijau yang belum memasukkan aspek gender dan HAM merupakan faktor eksternal yang memotivasi PRAKARSA untuk memberikan pelatihan pengarusutamaan gender pada multipihak.

improvement and progress in the financial sector and encourage responsibility for implementing ESG principles in business. Therefore, with the support of FFA and Connecting Founders, PRAKARSA invited several banking institutions, the Government, and CSOs to participate in the training on gender mainstreaming in the banking sector.

The activity implementation contributed to realizing PRAKARSA's vision and mission to promote prosperous and just policy discourses, knowledge, and practices. PRAKARSA worked as the Co-coordinator of ResponsiBank Indonesia, a national coalition that advocates for improvements in financial institutions' policies and practices. ResponsiBank Indonesia assessed the need to strengthen small and large business activities with standard policies and practices related to the percentage of female leadership and board members in the company. The development of G&I (gender diversity and inclusion) in the business sector is primarily driven by investor demand and regulatory pressure. In addition, gender affects the performance of long-term investments.

As the external networks, FFA, Connecting Founders, Financial Services Authority, and several Banks in Indonesia collaborating with PRAKARSA encouraged this accomplishment. Besides, the issuance of the Green Taxonomy that did not include gender and human rights aspects constituted an external factor that motivated PRAKARSA to provide gender mainstreaming training to multistakeholders.



Pelatihan peningkatan kapasitas advokasi dan kampanye publik: anggota TAFJA di ASEAN dan anggota Forum Pajak Berkeadilan Indonesia (FPB) hadir dan berkomitmen turut advokasi di forum G20 Indonesia 2022 (Bali, Maret 2022).

Public advocacy and campaign capacity building training: the members of TAFJA in ASEAN and the members of Indonesia's Just Tax Forum (FPB) attended and were committed to participating in the 2022 G20 Forum in Indonesia (Bali, March 2022)



Pelatihan ini bertujuan untuk peningkatan kemampuan anggota C20, TAFJA, dan kelompok CSO lainnya untuk melakukan advokasi dan kampanye publik khususnya dalam isu trade, tax & fiscal, dan gender. Pelatihan ini merupakan upaya untuk memperkuat CSO menjelang KTT G20 di Indonesia pada November 2022. Pelatihan ini melibatkan CSO dari berbagai negara yaitu dari ASEAN (Indonesia, The Philippines, Cambodia, Vietnam, Thailand), Asia (India, Nepal, Pakistan), dan perwakilan CSO perwakilan Eropa dari Belgium.

Outcome ini berkontribusi terhadap misi PRAKARSA yaitu menyelenggarakan pengembangan kapasitas, pendidikan, dan pelatihan bagi pemangku kepentingan serta mengembangkan jejaring antar-CSO dalam menginisiasi reformasi kebijakan. Peran PRAKARSA dalam tercapainya outcome ini karena peran PRAKARSA sebagai co-coordinator dari TAFJA dan juga koordinator untuk pelaksanaan program F4A di tingkat ASEAN.

Kegiatan ini tidak terlepas dari dukungan pihak eksternal yaitu F4A Asia yang memiliki salah satu tujuan untuk meningkatkan kapasitas CSO yang berhubungan dengan advokasi. Kehadiran Tove

This training aimed to increase the competency of the members of C20, TAFJA, and other CSO groups to implement advocacy and public campaigns, especially on several issues, including trade, tax & fiscal, and gender. Besides, it also served as an effort to strengthen CSOs for the G20 Summit in Indonesia in November 2022. This training involved CSOs from various countries, namely from ASEAN (Indonesia, The Philippines, Cambodia, Vietnam, Thailand), Asia (India, Nepal, Pakistan), and European CSO representatives (Belgium).

This outcome also contributed to realizing PRAKARSA's mission to organize capacity building, education, and training for stakeholders and develop networks among CSOs to initiate policy reforms. The outcome could be achieved after PRAKARSA took the role of a co-coordinator for TAFJA and the implementation of the F4A program at the ASEAN level.

This activity received support from external parties, including F4A Asia, which aimed to increase the capacity of CSOs focusing on advocacy issues. The presence of Tove Maria Ryding from Eurodad also intensified the substance of the training. The

Maria Ryding dari Eurodad juga turut memperkuat substansi dalam pelatihan. Momentum KTT G20 yang diselenggarakan di Indonesia menjadi acuan untuk adanya peningkatan kapasitas dalam hal kampanye dan advokasi serta memperdalam isu-isu yang akan diarusutamakan dalam rekomendasi kebijakan yang diberikan oleh C20.

G20 Summit organized in Indonesia has become momentum and can be used as a reference for capacity building in terms of campaigning and advocacy, as well as focusing on the issues to be mainstreamed in the policy recommendations provided by the C20.



Promosi Ide, Wacana, Pengetahuan, dan Praktik Kebijakan Keadilan Sosial-Ekonomi & Kesejahteraan

Promotion of Ideas, Discourses,
Knowledge, and Practice of Socio-
Economic Justice & Welfare Policies

Webinar/ Talkshow

15 Maret 2022 • March 15, 2022



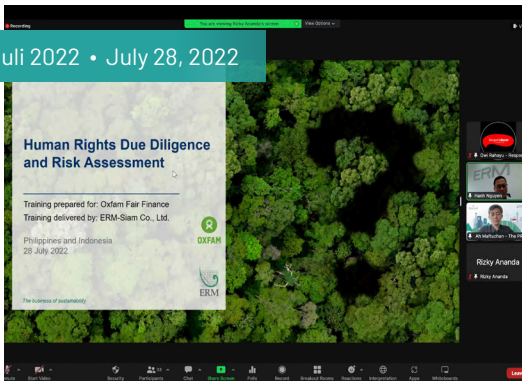
Perlindungan Konsumen Digital Finance
(Digital Finance Consumers Protection)

24 Mei 2022 • May 24, 2022



Diskusi Publik “Bagaimana Pertanggungjawaban Perbankan pada Pembiayaan Industri Semen?” (“How are the Banking Institutions Responsible for Financing the Cement Industry?”)

28 Juli 2022 • July 28, 2022



Curtailing Risk Through Adaptive Social Protection: A Pathway to Resilient Global Community

11 Agustus 2022 • August 11, 2022

Penyandang Disabilitas: Mitos atau Fakta?



Ahmad Dzulkarnain
Fotografer Profesional



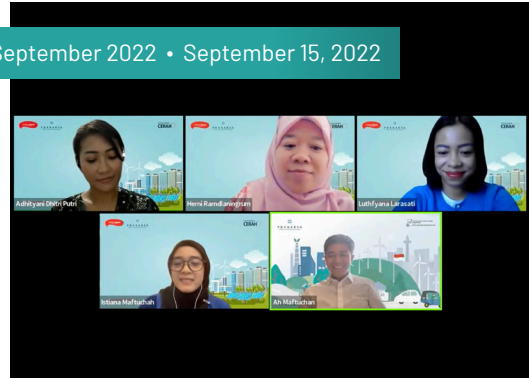
Pasar Kerja yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas: Mitos atau Fakta? (Inclusive Job Market for Persons with Disabilities: Is it a Myth or Fact?)

9 Juni 2022 • June 9, 2022



Diskusi Bedah Buku Etika Perbankan
(Discussion on Book Review of Etika Perbankan/Ethics in Banking)

15 September 2022 • September 15, 2022



Diskusi Publik Taksonomi Hijau Indonesia dalam Mengakselerasi Pembiayaan Transisi Energi (Indonesian's Green Taxonomy in Accelerating the Energy Transition Financing)

10 Oktober 2022 • October 10, 2022



Tata Kelola Keuangan Berkelanjutan untuk Penguatan Ekonomi Rakyat dan Lingkungan yang Berkeadilan
(Sustainable Financial Governance for Strengthening the People's Just Economy and Environment)

23 September 2022 • September 23, 2022



Menakar Gagasan Penerapan Pajak Kekayaan di Indonesia
(Examining the Idea of Implementing Wealth Tax in Indonesia)

Op-eds

Opposite the editorial page



The Jakarta Post, 11 February 2022
by Setyo Budiantoro

Digital Technology Brings Prosperity to Rural Areas



The Jakarta Post, 18 February 2022
by Victoria Fanggidae & Eka Afrina Djamhari

Getting the Wrong Ends of The Stick: The Pensions Debate



AntaraneWS, 21 April 2022
by Herni Ramdhaningrum

Emansipasi dan Pajak Berkeadilan untuk Perempuan Indonesia

Emancipation and Tax Justice for Indonesian Women



Koran Tempo, 22 April 2022
by Herni Ramdhaningrum

Undang-Undang Kekerasan Seksual dan Terobosan Advokasi Gender

Sexual Violence Law and Gender Advocacy Breakthrough



The Conversation, 29 May 2022
by Darmawan Prasetya

Maraknya generasi sandwich: refleksi perlunya reformasi sistem pensiun di Indonesia

Requiring Recipients to Use Mobile Apps Might Hamper Efforts to Distribute Much-Needed Goods



The Conversation, 6 July 2022
by Rizky Deco Praha

Requiring recipients to use mobile apps might hamper efforts to distribute much-needed subsidised goods



The Jakarta Post, 26 July 2022
by Fiona Armintasari et al

Green Taxonomy: G20's Beacon for Transitioning to a Green Economy and Beyond



Sindonews, 4 August 2022
by Ivan Tengku Harja

Bisnis dan HAM
Business and Human Rights



East Asia Forum, 17 August 2022
by Darmawan Prasetya and Eka Afrina Djahari

Healthcare costs leave Indonesians out-of-pocket



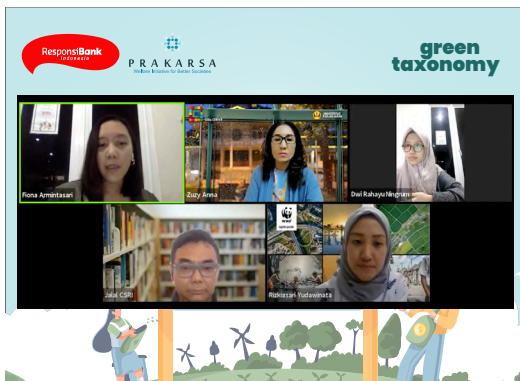
The Conversation, 9 November 2022
by Rizky Deco Praha

Orang miskin baru Indonesia terbesar kedua di Asia, kemiskinan multidimensi harus mulai jadi perhatian

Indonesia's Second Largest New Poor in Asia, Multidimensional Poverty Must Start to Become a Concern

Engagement dengan Private Sector

Engagement with the Private Sectors



21 Januari 2022 • January 21, 2022

Taksonomi Hijau untuk Mendukung Ekosistem Keuangan Berkelanjutan di Indonesia

Green Taxonomy to Support Sustainable Finance Ecosystem in Indonesia



8 Maret 2022 • March 8, 2022

Towards Gender-Inclusive Sustainable Finance to Ensuring A Just Transition



6 Oktober 2022 • October 6, 2022

**BEPS Implementation and Tax
Transparency in Addressing Tax
Crime**



14 November 2022 • November 14, 2022

**Envisaging Wealth Tax in The Post-
Pandemic World**



14 November 2022 • November 14, 2022

**Financing The Just Transition:
Powering Asia's Sustainable Energy
Future (Fireside Chat)**



14 November 2022 • November 14, 2022

**Media Lab: Balanced Reporting
in the Age of Greenwashing and
Misinformation**

Video atau film

Video or Film



Film dokumenter • Documentary film

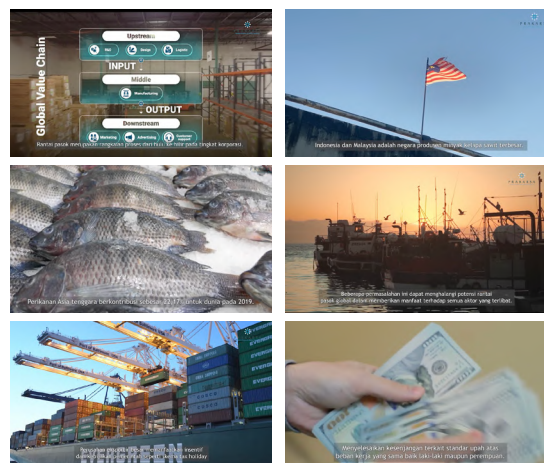
Lagi-lagi Pabrik Semen: Petani Pati Terancam

Over and Over, the Cement Factory Threatens the Life of Farmers in Pati



Video dokumenter • Documentary video

Global Value Chain



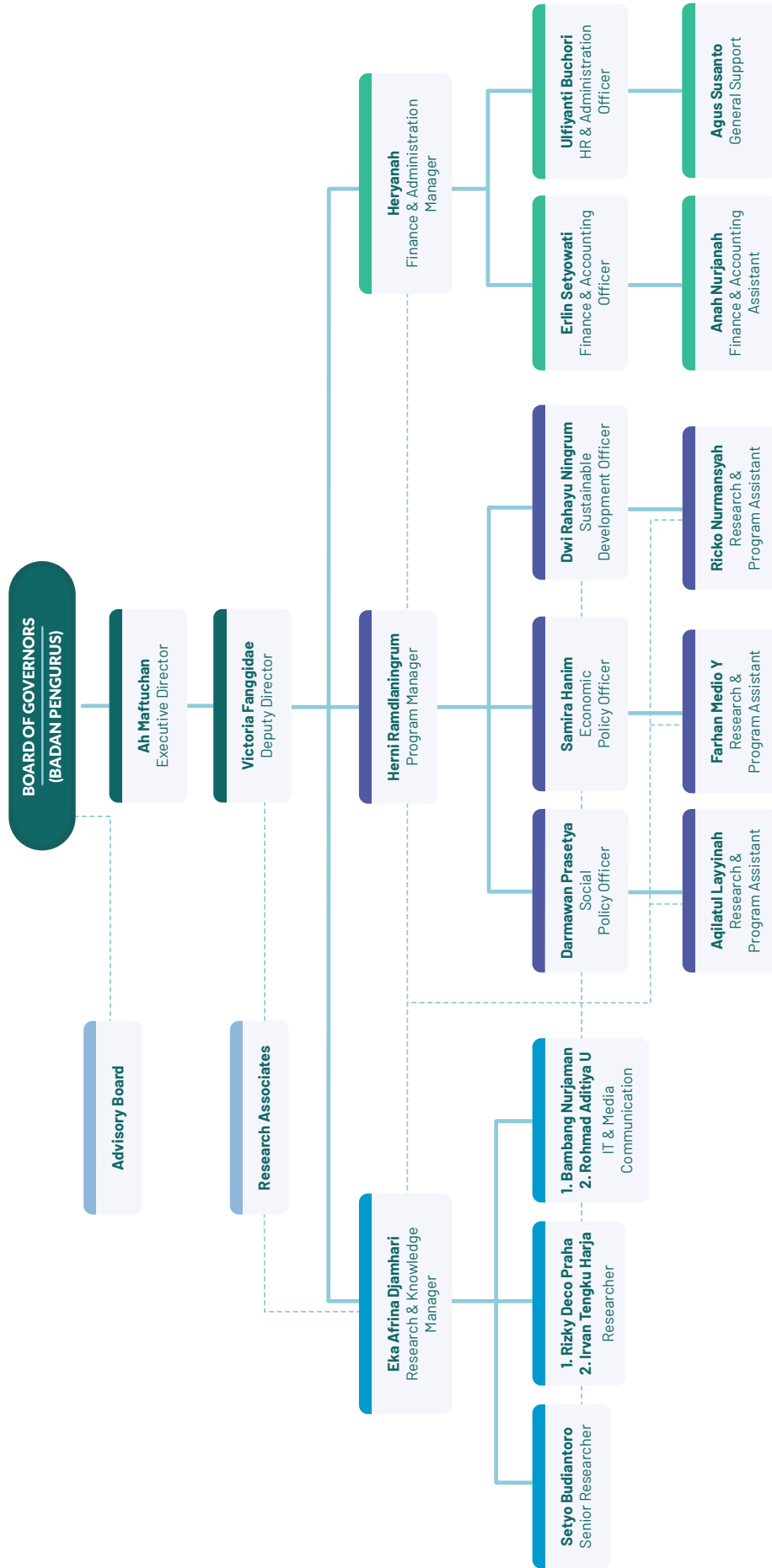


Sumber Daya Manusia dan Keuangan Organisasi

Human and Financial Resources of the
Organization

Tim PRAKARSA di 2022

PRAKARSA Team in 2022



Staf PRAKARSA

PRAKARSA Staff



AH MAFTUCHAN
Executive Director



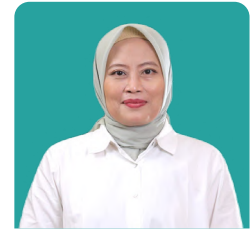
VICTORIA FANGGIDAE
Deputy Executive Director



HERNI RAMDLANINGRUM
Program Manager



EKA AFRINA DJAMHARI
Research and Knowledge Manager



HERYANAH
Finance and Administration Manager



DWI RAHAYU NINGRUM
Sustainable Development Officer



SAMIRA HANIM
Ad Interem Fiscal Policy Officer



DARMAWAN PRASETYA
Social Policy Officer



IRVAN TENGU HARJA
Researcher



RIZKY DECO PRAHA
Researcher



AQILATUL LAYYINAH
Program & Research Assistant



FARHAN MEDIO YUDYANTO
Program & Research Assistant



RICO NURMANSYAH
Program & Research Assistant



ERLIN SETYOWATI
Finance & Accounting Officer



ANAH NURJANAH
Finance & Accounting Assistant



ULFIYANTI BUCHORI
HR & Administration Officer



BAMBANG NURJAMAN
IT & Media Support



ROHMAD ADITIYA UTAMA
Media & Communication



AGUS SUSANTO
General Support

Staf Magang

Intern Staff



SITA MELLIA
Project Administration



**ROHMAD ADITIYA
UTAMA**
Media Support



**MONICA NOVENTYA
PARCELESTI**
Finance Support

Badan Pengurus, Penasehat & Associate 2022

Supervisory Board, Advisory Board, & Research Associates in 2022



PURNAMA ADIL MARATA
Ketua



BINNY BUCHORI
Bendahara



ATI NURBAITI
Sekretaris



SUGENG BAHAGIYO
Anggota



YUYUN YUNIA ISMAWATI
Anggota



**MUHAMMAD HANIF
DHAKIRI**
Anggota

Badan Penasehat

Advisory Board



ZUMROTIN K. SUSILO



**FILOMENO S. STA.
ANA III**

Associate Researchers

Research Associates



Prof. HASBULLAH THABRANY
Universitas Indonesia



Prof. ANDREW ROSSER
University of Melbourne



EDI SUHARTO, Ph.D
Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial



POPPY ISMALINA, Ph.D
Universitas Gadjah Mada



Dr ARIE SUJITO
Universitas Gadjah Mada



A PRASETYANTOKO, Ph.D
Atma Jaya



Ass. Prof. ZULFAN TADJOEDDIN, Ph.D
Western Sydney University



FACHRU NOVRIAN, Ph.D
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta



Dr FAJAR LUHUR MARTHA
Litbang Kompas

Pengembangan SDM Internal

Internal Human Resources Development



Sumber daya manusia adalah aset berharga bagi organisasi. Agar dapat meningkatkan kekuatan sumber daya manusia, organisasi mengupayakan berbagai hal, seperti training, pendidikan, short course, dan lain-lain.

Human resources serve as a valuable asset for the organization. In order to escalate the capacity of human resources, the organization has strived to manage a wide range of activities, such as training, education, short courses, and so forth.

Pelatihan

Training

Training dilakukan untuk meningkatkan kapasitas organisasi maupun individu. Berbagai pelatihan yang disediakan dan diikuti oleh Staf PRAKARSA untuk peningkatan kapasitas pada tahun ini antara lain sebagai berikut.

The training aimed to escalate the capacity of the organization and individuals. The PRAKARSA staff attended various organized training for capacity building in 2022, among others:

1

Maret-April 2022 • March - April 2022

Pelatihan Penggunaan Tools Analisis Penelitian Kuantitatif (STATA)

Training on the Use of a Quantitative Research Analysis Tool (STATA)

2

Maret 2022 • March 2022

Pelatihan Penggunaan Tools Analisis Penelitian Kualitatif (N-Vivo)

Training on the Use of a Qualitative Research Analysis Tool (N-Vivo)

3

Juni 2022 • June 2022

Pelatihan Integritas Produksi Pengetahuan dan Manajemen Penelitian

Training on the Knowledge Production Integrity and Research Management

4

April-Juli 2022 • April - June 2022

Pelatihan Brevet A untuk Staf Keuangan

Training on Brevet A for the Financial Staff

5

Juli 2022 • July 2022

Pelatihan Penulisan Jurnal (Juli 2022)

Training on Journal Writing (July 2022)

6

Juni 2022 • July 2022

Pelatihan Human Resource Business Partner, diikuti oleh HRAO (Juni-Juli 2022)

Training on Human Resources Business Partners, attended by HRAO (June - July 2022)

7

Oktober 2022 • October 2022

Pelatihan Keamanan Digital, diikuti oleh tim IT & Media

Training on Digital Security, attended by the IT & Media Team

8

Agustus–Desember 2022 • August–December 2022

Pelatihan Staf untuk Skill bahasa Inggris

Training on English Skills for Staff



Beasiswa Pendidikan

Education Scholarships

Sepanjang 2022, terdapat tiga orang Staf PRAKARSA yang mendapatkan bantuan pendidikan untuk jenjang S3 dan S2.

Throughout 2022, three PRAKARSA staff were awarded scholarships to pursue master and doctorate degrees.

Short Course

Peneliti PRAKARSA mengikuti short course Multidimensional Poverty Index atau Indeks Kemiskinan Multidimensi dengan metode Alkire-Foster yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, langsung diberikan oleh OPHI dari Oxford oleh Sabina Alkire pada Agustus 2022.

The research team of PRAKARSA participated in a short course on Multidimensional Poverty Index using an Alkire-Foster Method organized by the Faculty of Economics and Business of Universitas Indonesia. This short course was exclusively presented by Sabina Alkire from the Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) of the University of Oxford on August 2022.

Konferensi Internasional dan Nasional

International and National Conferences

Abstrak dari 3 staf PRAKARSA diterima untuk dipresentasikan di 2 konferensi internasional dan 1 konferensi nasional bereputasi, yaitu ASAA (Asian Studies Association of Australia), TASA (The Australian Sociological Association), dan IRSA (Indonesian Regional Science Association).

Abstracts prepared by three PRAKARSA staff were accepted to be presented at two international conferences and one reputable national conference, i.e., ASAA (Asian Studies Association of Australia), TASA (The Australian Sociological Association), and IRSA (Indonesian Regional Science Association).

Dukungan Organisasi

Support Organizations

Sepanjang tahun 2022, PRAKARSA mendapatkan dukungan dari sejumlah lembaga, antara lain: BUILD - Ford Foundation (2021-2024); Ford Foundation (2020-2022); FFA - Oxfam Novib (2020 - 2022); F4A - Oxfam Novib and Regional (2021 - 2024); Human Act (2021-2022); AHF (2022); Action Aid Vietnam (2022); Oxfam in Indonesia (2022); Wikimedia; PSI-SPPLN Grup; Filantropi Indonesia; Indonesian for Global Justice (IGJ) - OSF; IIEF; RAN; dan Kementerian Ketenagakerjaan.

In 2022, PRAKARSA gained support from a wide range of institutions, including BUILD - Ford Foundation (2021-2024); Ford Foundation (2020-2022); FFA - Oxfam Novib (2020-2022); F4A - Oxfam Novib and Regional (2021 - 2024); Human Act (2021-2022); AHF (2022); Action Aid Vietnam (2022); Oxfam in Indonesia (2022); Wikimedia; PSI-SPPLN Grup; Filantropi Indonesia; Indonesian for Global Justice (IGJ) - OSF; IIEF; RAN; and the Ministry of Manpower.



DONOR PRAKARSA TAHUN 2022



FORD
FOUNDATION



European
Climate
Foundation



Oxfam Novib



FAIR FINANCE ASIA



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK
INDONESIA

Human Act



Indonesian
International
Education
Foundation
We Bridge the Future

act:onaid



OXFAM



Filantropi
INDONESIA



Indonesia
For Global Justice



WIKIMEDIA
FOUNDATION



AHF
AIDS HEALTHCARE
FOUNDATION

Laporan Keuangan

Financial Statement

Laporan keuangan terlampir menyajikan secara **“wajar dalam semua hal yang material”**, posisi keuangan Perkumpulan PRAKARSA tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Audit dilakukan oleh KAP. S. Mannan, Ardiansyah dan Rekan NIU-KAP/Office License: KEP 1430/KM.1/2012.

The accompanying financial statements present **“fairly in all material respects”**, the financial position of Perkumpulan PRAKARSA as of December 31, 2022, and its financial performance and cash flows for the year the ended, in accordance with Indonesia Financial Accounting Standards. An audit conducted by KAP. S. Mannan, Ardiansyah dan Rekan NIU-KAP/ Office License: KEP 1430/KM.1/2012.

PERKUMPULAN PRAKARSA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERKUMPULAN PRAKARSA
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(In IDR, unless otherwise stated)

URAIAN	2022	Catatan / Notes	2021	DESCRIPTIONS
ASET				ASSETS
Aset lancar				Current assets
Kas dan setara kas	6.467.261.228	2a, 2c, 3	12.574.300.417	Cash and cash equivalents
Piutang lain - lain	453.397.807	2a, 2d, 4	849.593.204	Others receivable
Uang muka	15.000.000	2a, 2e, 5	54.283.900	Advance
Biaya dibayar dimuka	3.703.384	2a, 6	-	Prepaid expenses
Total aset lancar	6.939.362.418		13.478.177.521	Total current assets
Aset tidak lancar				Non current assets
Aset tetap - nilai buku	26.208.999	2a, 2f, 7	44.185.208	Fixed assets - book value
Aset lain-lain	-	2a, 8	-	Others assets
Total aset tidak lancar	26.208.999		44.185.208	Total non current assets
Total aset	6.965.571.417		13.522.362.729	Total assets
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas jangka pendek				Current liabilities
Biaya yang masih harus dibayar	885.254.903	2a, 2g, 9	1.446.835.346	Accrued expenses
Utang pajak	24.755.205	2a, 2i, 10	70.870.704	Tax payable
Total liabilitas jangka pendek	910.010.108		1.517.706.050	Total current liabilities
Total liabilitas	910.010.108		1.517.706.050	Total liabilities
ASET NETO				NET ASSETS
Aset neto akhir tahun		2a, 2j, 11		Net assets end of year
Dengan pembatasan	269.962.194		7.820.442.067	With restrictions
Tanpa pembatasan	5.785.599.115		4.184.214.613	Without restrictions
Total aset neto	6.055.561.309		12.004.656.679	Total net assets
Total utang dan aset neto	6.965.571.417		13.522.362.729	Total liabilities and net assets

PERKUMPULAN PRAKARSA
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERKUMPULAN PRAKARSA
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(In IDR, unless otherwise stated)

URAIAN	Catatan / Notes	2022			2021			DESCRIPTIIONS
		Dengan pembatasan / With restrictions	Tanpa pembatasan/ Without restrictions	Total	Dengan pembatasan / With restrictions	Tanpa pembatasan / Without restrictions	Total	
Penerimaan								Receipts
Hibah	2a, 2k, 12	8.723.711.167	-	8.723.711.167	17.361.462.053	-	17.361.462.053	Grant
Sumbangan		-	2.577.035.459	2.577.035.459	-	2.314.414.492	2.314.414.492	Donation
Pendapatan bunga		-	104.910.748	104.910.748	-	60.256.930	60.256.930	Bank interest
Pendapatan lain-lain		-	67.967.916	67.967.916	-	854.000	854.000	Other income
Total penerimaan		8.723.711.167	2.749.914.123	11.473.625.290	17.361.462.053	2.375.525.423	19.736.987.475	Total receipts
Beban								Expenses
Program	2a, 2k, 13	15.726.809.509	-	15.726.809.509	10.497.836.477	-	10.497.836.477	Program
Pegawai		-	245.520.804	245.520.804	-	924.150.108	924.150.108	Staff
Umum dan administrasi		-	826.312.461	826.312.461	-	458.108.146	458.108.146	General and administration
Perjalanan		-	32.585.173	32.585.173	-	2.900.940	2.900.940	Travel
Penyusutan		-	17.976.211	17.976.211	-	20.615.625	20.615.625	Depreciation
Beban lain-lain		-	26.134.970	26.134.970	-	14.412.380	14.412.380	Other expenses
Total beban		15.726.809.509	1.148.529.620	16.875.339.129	10.497.836.477	1.420.187.199	11.918.023.677	Total expenses
SURPLUS (DEFISIT)		(7.003.098.342)	1.601.384.503	(5.401.713.839)	6.863.625.575	955.338.223	7.818.963.798	SURPLUS (DEFICIT)

PERKUMPULAN PRAKARSA
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PERKUMPULAN PRAKARSA
STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(In IDR, unless otherwise stated)

URAIAN	2022	2021	DESCRIPTIONS
Total penerimaan	11.473.625.290	19.736.987.475	Total receipts
Total beban	16.875.339.129	11.918.023.677	Total expenses
Kenaikan (penurunan) aset neto	(5.401.713.839)	7.818.963.798	Increased (decrease) in net assets
Aset neto awal tahun	12.004.656.679	4.185.692.881	Net asset at the beginning of the year
Penyesuaian aset bersih	(547.381.531)	-	Net asset adjustment
Aset neto akhir tahun	6.055.561.309	12.004.656.679	Net assets at the end of the year

**PERKUMPULAN PRAKARSA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022 DAN 2021**
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PERKUMPULAN PRAKARSA
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022 AND 2021**
(In IDR, unless otherwise stated)


URAIAN	2022	2021	DESCRIPTIONS
AKTIVITAS OPERASIONAL			OPERATING ACTIVITIES
Aset neto setelah depresiasi	(5.401.713.839)	7.818.963.798	Net assets after depreciation
Depresiasi aset tetap	17.976.211	20.615.625	Depreciation of fixed assets
Arus kas sebelum perubahan aset neto	(5.383.737.627)	7.839.579.423	Cash flows before changes net assets
Koreksi aset bersih	(547.381.531)	-	Net assets adjustment
Piutang	396.195.397	(249.100.285)	Account receivables
Uang muka	39.283.900	210.000	Advance
Biaya dibayar dimuka	(3.703.384)	-	Prepaid expenses
Biaya yang masih harus dibayar	(561.580.443)	574.389.639	Accrued expenses
Utang pajak	(46.115.499)	1.469.683	Tax payable
Arus kas bersih dari aktivitas operasional	(6.107.039.189)	8.166.548.460	Net cash flows from operating activities
AKTIVITAS INVESTASI			INVESTING ACTIVITIES
Penambahan aset tetap	-	-	Additional fixed assets
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	-	-	Net cash flows from investing activities
AKTIVITAS PENDANAAN			FINANCING ACTIVITIES
Liabilitas	-	-	Liabilities
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	-	-	Net cash flows from financing activities
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	(6.107.039.189)	8.166.548.460	Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun	12.574.300.417	4.407.751.956	Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	6.467.261.228	12.574.300.417	Cash and cash equivalents at the end of the year





PRAKARSA
Welfare Initiative for Better Societies

Komplek Rawa Bambu 1
Jl. A No. 8E Kel. Pasar Minggu,
Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan

 +62 21 7811 798

 perkumpulan@theprakarsa.org

    The PRAKARSA

  PRAKARSA Podcast

Follow us:   Perkumpulan PRAKARSA   The PRAKARSA

 www.theprakarsa.org